

SMERU

The SMERU Research Institute/Lembaga Penelitian SMERU

No. 18: Apr-Jun/2006

MEMPERKENALKAN SISTEM PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN OLEH MASYARAKAT INTRODUCING THE COMMUNITY-BASED MONITORING SYSTEM



Dok. SMERU/SMERU Doc.



Dok. http://www.cianjur.or.id/content/isi_link_galleri_foto.php

Selama ini, pemantauan kondisi kemiskinan di Indonesia lebih mengandalkan pada penggunaan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan dari survei Potensi Desa (Podes). Kedua survei ini kurang terpilah dan tidak responsif terhadap perubahan-perubahan cepat yang diakibatkan oleh guncangan ekonomi. Di samping itu, karena terdapat variasi besar menyangkut kondisi kemiskinan di masing-masing daerah, kebutuhan khusus setiap daerah perlu mendapat perhatian. Hal ini mendorong munculnya kebutuhan akan adanya sistem pemantauan kemiskinan yang dikelola sendiri oleh masyarakat lokal.

Dalam rangka mengembangkan sebuah sistem pemantauan kemiskinan yang dapat menjawab permasalahan di atas, Lembaga Penelitian SMERU dengan dukungan Angelo King Institute, Universitas De La Salle, Manila melakukan uji coba Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM), sebuah sistem pemantauan yang mudah dipahami oleh penduduk lokal, dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, murah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasilnya disajikan dalam newsletter edisi ini.

To date, poverty monitoring in Indonesia largely relies on the use of data sourced from the National Socio-economic Survey (Susenas) and the Village Potential Survey (Podes). These surveys are aggregated and unresponsive to the rapid changes caused by economic shocks. In addition, because there are great variations in poverty conditions across districts, it is necessary to pay attention to the particular needs of each district. This situation gave rise to the need for a locally-managed poverty monitoring system.

In order to develop a poverty monitoring system that could address the issues above, The SMERU Research Institute with support from the Angelo King Institute, De La Salle University, Manila conducted a pilot test of the Community-Based Monitoring System (CBMS), a monitoring system that can be easily grasped by local communities, can be completed in a relatively short period, and is inexpensive and scientifically rigorous. The results are presented in this edition of the newsletter.

DARI EDITOR	2
HALO SMERU	3
FOKUS KAJIAN	4
Memperkenalkan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat	
DATA BERKATA	10
Mengidentifikasi Indikator Kemiskinan Spesifik-Lokal dengan Menggunakan Analisis Komponen Dasar (PCA)	
DARI LAPANGAN	16
Pendataan dalam Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat	
OPINI	24
Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat: Sebuah Perspektif	
KABAR DARI LSM	28
Partisipasi PKBH-B dalam Pengumpulan Data dan Pemantauan Program Kemiskinan	

FROM THE EDITOR	2
DEAR SMERU	3
FOCUS ON	4
Introducing the Community-Based Monitoring System	
AND THE DATA SAYS	10
Identifying Locally-Specific Poverty Indicators by Using Principal Components Analysis (PCA)	
FROM THE FIELD	16
Data Collection in the Community-Based Monitoring System	
OPINION	24
Community-Based Monitoring System: A Perspective	
NEWS FROM NGOs	28
The Participation of PKBH-B in Data Collection and Monitoring of Poverty Programs	

Pembaca yang Budiman,

Kebutuhan mendesak terhadap keberadaan data mikro untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan bermula dari rendahnya tingkat ketercakupannya program (*undercoverage*) dan tingginya kebocoran dalam beberapa program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, era desentralisasi mensyaratkan pemerintah daerah memiliki data yang lebih terperinci agar dapat melakukan intervensi kebijakan. Faktor inilah yang mendorong perlunya sebuah sistem pemantauan kesejahteraan yang mampu menyediakan data kemiskinan yang objektif, cepat, dan akurat serta tanggap terhadap karakteristik lokal. Sistem ini kemudian dikenal dengan nama Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM).

Mengingat pentingnya SPKM ini dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka dalam SMERU Newsletter Edisi No.18, kami menyajikan temuan utama proses pelaksanaan uji coba SPKM dan pengalaman lembaga-lembaga lain dalam kegiatan pemantauan kemiskinan. Selain temuan utama, rubrik "Fokus Kajian" juga memaparkan kelebihan SPKM dibanding sistem pemantauan yang ada dan keuntungan dari keterlibatan masyarakat.

Rubrik "Data Berkata" menjelaskan penggunaan metode statistik "Analisis Komponen Dasar" (PCA) untuk menentukan penduduk yang miskin dalam suatu daerah. Sementara itu, rubrik "Dari Lapangan" menggambarkan proses pemilihan dan pelatihan pendata. Untuk rubrik "Opini," Celia Reyes, Direktur Proyek Dampak Mikro Kebijakan Penyesuaian Makroekonomi (MIMAP), memberi gambaran singkat sejarah SPKM dan pelaksanaannya di negara-negara lain, khususnya di Asia. Mengakhiri edisi ini, Rubrik "Kabar dari LSM" menyajikan pengalaman PKBH-B, sebuah LSM di Bengkulu, dalam melakukan pendataan dan pemantauan kemiskinan.

Selamat membaca.

Liza Hadiz
Editor



Dear Readers,

The urgent need for micro data to identify poverty conditions initially emerged from the high rate of program undercoverage and leakage that occurred in several poverty reduction programs in Indonesia. In addition, the decentralization era in Indonesia requires that local officials own disaggregated data for policy intervention. These factors supported the need for a welfare monitoring system that is capable of providing quick, objective, and accurate poverty data, and that also takes into account local characteristics. This system is known by the name of Community-Based Monitoring System (CBMS).

Given the importance of CBMS in the efforts to reduce poverty, edition No. 18 of the SMERU Newsletter presents the main findings of the test pilot implementation of CBMS and the experience of other institutions in poverty monitoring activities. Apart from the main findings, the "Focus On" column also explains the advantage of CBMS compared with existing monitoring systems and looks at the benefits of community involvement.

The column "And the Data Says" explains the use of the statistical method, "Principal Components Analysis" (PCA), for the determination of poor communities in a locality. Meanwhile, the column "From the Field" describes the selection and training process for enumerators. For the "Opinion" column, Celia Reyes, Director of the Micro Impacts of Macroeconomic Adjustment Policies (MIMAP) project provides a brief picture of the history of CBMS and its implementation in other countries, especially in Asia. Rounding out this edition, the column "News From NGOs" presents the experience of PKBH-B, an NGO in Bengkulu, in undertaking data collections and poverty monitoring.

We hope you enjoy this edition.

Liza Hadiz
Editor

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Melihat tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, perbaikan sektor sosial, pengembangan demokrasi, dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka kajian independen sebagaimana yang dilakukan oleh SMERU selama ini terus dibutuhkan.

SMERU is an independent institution for research and policy studies which professionally and proactively provides accurate and timely information as well as objective analysis on various socio-economic and poverty issues considered most urgent and relevant for the people of Indonesia.

With the challenges facing Indonesian society in poverty reduction, social protection, improvement in social sector, development in democratization processes, the implementation of decentralization and regional autonomy, there continues to be a pressing need for independent studies of the kind that SMERU has been providing.

Newsletter SMERU diterbitkan untuk berbagi gagasan dan mengundang diskusi mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Temuan, pandangan, dan interpretasi yang dimuat dalam Newsletter SMERU sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan di luar tanggung jawab SMERU atau badan penyanggah dana SMERU. Silahkan mengirim komentar Anda. Jika Anda ingin terdaftar dalam mailing list kami, kunjungi website SMERU atau kirim e-mail Anda kepada kami.

The SMERU newsletter is published to share ideas and to invite discussions on social, economic, and poverty issues in Indonesia from a wide range of viewpoints. The findings, views, and interpretations published in the articles are those of the authors and should not be attributed to SMERU or any of the agencies providing financial support to SMERU. Comments are welcome. If you would like to be included on our mailing list, please note our address and telephone number.

The SMERU RESEARCH INSTITUTE
Jl. Pandeglang No. 30 Menteng, Jakarta 10310 Indonesia
Phone: 6221-3193 6336; Fax: 6221-3193 0850
e-mail: smeru@smeru.or.id; website: www.smeru.or.id

■ DEWAN REDAKSI/EDITORIAL BOARD:

Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Syaikhul Usman, Sri Kusumastuti Rahayu, Nuning Akhmadi, Widjajanti I. Suharyo

■ REDAKSI/EDITORIAL STAFF: Editor: Liza Hadiz; Assistant Editor: R. Justin Sodo; English Translator: Chris Stewart

■ Desain Grafis/Graphic Designer: Novita Maizir ■ Distribusi/Circulation: Mona Sintia

Halo SMERU,

Saya beberapa waktu lalu mengunjungi Website SMERU dan menemukan NGO Database, namun sayangnya pada saat ini (12 Mei 2006 –Ed.) Website SMERU tidak bisa diakses. Saat ini BaKTI –Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (www.bakti.org) sedang menyusun direktori NGO Perempuan di Indonesia Timur dan salah satu sumber referensi untuk perbandingan kami dapatkan dari NGO Database SMERU. Ada beberapa wilayah yang belum sempat diakses seperti Sulawesi, Papua, dan Maluku. Bisakah saya mendapatkan informasi lengkap mengenai ketiga tiga wilayah tersebut?

Ferderika Tadu Hungu

Mohon maaf, pada waktu itu Website SMERU sedang dalam perbaikan, namun saat ini sudah bisa diakses kembali. Silakan mendownload informasi yang Anda butuhkan dari situs web kami.
–Editor

Halo SMERU,

Terima kasih dari saya dan Sad Dian Utomo (Mas Sad) atas dimuatnya tulisan kami di Newsletter SMERU. Semoga ke depan kita dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi. Mungkin yang sedikit harus diralat, bahwa kami mewakili PATTIRO Jakarta, meski Mas Sad adalah Direktur PATTIRO Banten. Sekali lagi, terima kasih.

Mimin Rukmini
PATTIRO Jakarta

Terima kasih untuk koreksinya.
–Editor



Dear SMERU,

I have just recently visited the SMERU Website and came across the NGO Database, but unfortunately, at this moment (12 May 2006 –Ed.) the SMERU Website could not be accessed. Currently, BaKTI –the Eastern Indonesia Information Exchange (www.bakti.org) is compiling a Women's NGO directory in East Indonesia and one source of information used to compare data is the SMERU NGO Database. There are several regions that we have not accessed yet, such as Sulawesi, Papua, and Maluku. Could I obtain complete information on these three regions?

Ferderika Tadu Hungu

Please accept our apologies, during that period the SMERU Website was under maintenance, but it can now be accessed again. Please feel free to download the information you need from our website.

–The editor

Dear SMERU,

Sad Dian Utomo (Mas Sad) and I would like to thank you for publishing our article in the SMERU Newsletter. We hope that we can develop an even stronger collaboration in the future. We would also like to correct the record that we represent PATTIRO Jakarta, although Mas Sad is the PATTIRO Director for the Banten region. Again, thanks.

Mimin Rukmini
PATTIRO Jakarta

Thank you for the correction.
–The editor

FORTHCOMING PUBLICATIONS/PUBLIKASI YANG AKAN DATANG

LAPORAN PENELITIAN

Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005 (Hastuti et al).
Dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

RESEARCH REPORT

A Rapid Appraisal of the PKPS-BBM (Compensation Program for Reduced Subsidies on Fuel) Education Sector School Operational Assistance (BOS) Program 2005 (Hastuti et al).
Available in Indonesian and English.

RECENT PUBLICATIONS/PUBLIKASI TERBARU

KERTAS KERJA/WORKING PAPER From Access to Income: Regional and Ethnic Inequality in Indonesia (Daniel Suryadarma et al).
Dalam bahasa Inggris/Available in English.

MEMPERKENALKAN SISTEM PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN OLEH MASYARAKAT *INTRODUCING THE COMMUNITY-BASED MONITORING SYSTEM*



Dok. SMERU/SMERU Doc.

Latar Belakang

Pengidentifikasi penerima bantuan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa metodologi yang sesuai yang bisa mengidentifikasi penerima bantuan secara tepat, program bantuan apapun akan gagal mencapai dampak yang diinginkan, walaupun komponen-komponen lain dalam program telah dirancang dengan baik.

Di Indonesia, dengan pengecualian Program Subsidi Langsung Tunai, program-program bantuan pemerintah lainnya, misalnya beasiswa bagi siswa miskin, kartu sehat, dan raskin (beras untuk rakyat miskin), menggunakan proses penargetan dua-langkah. Pertama, pemerintah pusat mengalokasikan bantuan ke tingkat daerah dengan menggunakan penargetan geografis. Walaupun pada setiap program proses penargetannya berbeda, pada umumnya daerah miskin mendapat kuota lebih besar. Kedua, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan dengan melaksanakan penargetan individual. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa bantuan diterima oleh yang berhak.

Pada umumnya, pemerintah daerah menggunakan data keluarga yang dikumpulkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Background

Identification of beneficiaries is one of the most crucial aspects in poverty reduction programs. Without a suitable methodology which can identify its beneficiaries accurately, any program would fail to achieve the desired impact, regardless of how well designed the other components of the program were.

In Indonesia, with the exception of the recent Unconditional Cash Transfer (UCT) program, other government assistance programs—for example, scholarships for poor students, health cards, and the subsidized rice scheme (raskin)—use a two-step targeting process. First, the central government allocates the programs to the district level using geographic targeting. Although the exact targeting process varies by program, poorer districts generally receive a larger quota under the program. The second targeting process is individual targeting, where each district government is responsible for ensuring that the programs reached the intended recipients.

Traditionally, district governments use family data collected annually by BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional/The National Family Planning Coordination Board). BKKBN started collecting family welfare data in 1994. As of 2004, BKKBN already

Nasional (BKKBN) setiap tahun. BKKBN memulai pengambilan data kesejahteraan keluarga sejak 1994. Pada 2004, BKKBN sudah memiliki data sekitar 175 juta individu di seluruh Indonesia. BKKBN mengkategorikan keluarga ke dalam lima kategori kesejahteraan: Prasejahtera, Sejahtera I hingga Sejahtera III, dan Sejahtera III+. Keluarga yang dianggap miskin adalah mereka yang dikategorikan sebagai keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.

Setelah UU Otonomi Daerah diberlakukan pada 2001, beberapa pemerintah daerah telah berusaha mengembangkan metodologi penargetan individual daerah mereka sendiri, misalnya Kota Balikpapan, Kabupaten Jember, dan Provinsi Jawa Timur. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi orang miskin terutama diambil dari indikator BKKBN dengan beberapa perubahan kecil.

Mekanisme penargetan yang digunakan pada program SLT 2005 berbeda, baik dengan yang digunakan BKKBN atau yang serupa dengan itu. Program SLT dirancang sebagai program pemerintah pusat, dengan demikian peran pemerintah daerah maupun tingkat di bawahnya sangat terbatas. Dalam program ini, BPS (Badan Pusat Statistik) melakukan penargetan individual melalui metode uji pendekatan kemampuan. Ada beberapa langkah untuk mengidentifikasi orang miskin di bawah Program SLT. Pertama, BPS menggunakan data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) Kor dari 2002 ke 2004 untuk mengidentifikasi indikator-indikator kemiskinan. Kemudian BPS mencacah karakteristik rumah tangga di seluruh Indonesia dengan menggunakan kuesioner yang baru. Akhirnya, setiap karakteristik data dimasukkan ke dalam komputer dan skor kesejahteraan setiap keluarga dihitung, sehingga disebut dengan istilah “uji pendekatan kemampuan”. Melalui proses ini, BPS kemudian menentukan keluarga yang layak menerima bantuan dana tunai.

Terdapat dua perbedaan menonjol antara metodologi BPS dan BKKBN. Pertama, BPS menggunakan metodologi yang jauh lebih canggih untuk mengungkap indikator kemiskinan yang bersifat spesifik bagi setiap kabupaten, sementara BKKBN menggunakan daftar indikator kemiskinan sederhana secara nasional. Kedua, BPS menggunakan stafnya sendiri dalam proses pencacahan, sementara BKKBN menggunakan penduduk setempat. Perbedaan-perbedaan ini mengakibatkan bahwa kedua metodologi mempunyai kekuatannya masing-masing, tetapi hal ini juga mengakibatkan keduanya mempunyai kelemahan yang dapat mengakibatkan kekurangan maupun kebocoran.

had data on 175 million individuals across Indonesia. BKKBN classifies families into five welfare categories: Pre-prosperous, Prosperous I to Prosperous III, and Prosperous III+. Families considered poor are those classified as Pre-prosperous and Prosperous I.

Since the Regional Autonomy Law was implemented in 2001, several district or provincial governments such as Kota Balikpapan, Kabupaten Jember, and the province of East Java have tried to define their own individual targeting methodology. The indicators used to identify the poor are mainly adapted from the BKKBN indicators, with some minor adjustments.

The targeting mechanism used in the 2005 UCT program is different from the BKKBN or BKKBN-cloned checklist of the poor. UCT is designed as an exclusively central government program, where district and lower level governments have a very limited role. In this program, Statistics Indonesia (BPS) conducted the individual targeting through a method called proxy-means testing. There are several steps to identify the poor under the UCT. First, BPS uses Susenas Core data (National Socio-economic Survey) from 2002 to 2004 to identify poverty proxy indicators in each district. Then, BPS deploys its personnel throughout the country to enumerate household characteristics using a newly created questionnaire. Finally, each family characteristic is then entered into a computer where the welfare score of each family is calculated, hence the term “proxy means test”. Through this process, BPS then determines the families eligible to receive the cash transfer.

There are two obvious differences between the BPS and BKKBN methodologies. Firstly, BPS uses a much more sophisticated methodology to uncover district-specific poverty indicators, while BKKBN uses a simple nationwide checklist. Secondly, BPS uses its own personnel in the enumeration, while BKKBN uses local residents. While these differences mean that each methodology has its own strengths over the other, it also means that both have weaknesses that could cause undercoverage and leakage in each program.

Pelatihan pencacah diadakan selama satu hari di kantor desa selama tiga sampai empat jam.

Training of enumerators took place on one day in the village offices for three to four hours.



Dok. SMERU/SMERU Doc.

Para pencacah Desa Kedondong, Kabupaten Demak.

Enumerators of Desa Kedondong, Kabupaten Demak.



Dok. SMERU/SMERU Doc.

Kelemahan utama kedua metode adalah mudahnya terjadi manipulasi data. Karena indikator ditentukan sebelum pengumpulan data, maka perubahan karakteristik keluarga agar dapat dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin secara relatif mudah dilakukan. Kedua, kemiskinan merupakan fenomena yang sifatnya lokal, dalam pengertian, karakteristik orang miskin berbeda antardesa. Oleh karena itu, satu daftar indikator untuk satu kabupaten saja akan menimbulkan bias, apalagi daftar indikator untuk satu negara. Idealnya, ada sistem yang memadukan kekuatan kedua metode itu, seperti memanfaatkan pengetahuan lokal dan menggunakan metodologi canggih, serta tidak mengandung kelemahan-kelemahan tersebut di atas.

Dengan semangat ini, Lembaga Penelitian SMERU merancang dan menguji coba suatu metode baru untuk mengidentifikasi masyarakat miskin. Dengan mengadopsi kelebihan metode BKKBN, sistem baru ini banyak melibatkan penduduk lokal di suatu daerah. Sedangkan dengan mengambil kelebihan metode BPS, indikator kemiskinan dirancang agar peka terhadap kondisi lokal dengan menggunakan penghitungan statistik yang relatif modern. Untuk memperbaiki kelemahan keduanya, indikator kemiskinan ditentukan setelah pengambilan data selesai sehingga mencegah kemungkinan manipulasi data, dan dengan demikian, indikator kemiskinan yang spesifik pada tingkat desa dapat ditentukan. Sesuai dengan cara kerjanya, sistem yang baru ini dinamakan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM).

Deskripsi tentang SPKM

SPKM menggunakan dua kuesioner untuk pengambilan data berdasarkan karakteristik keluarga dan desa. Kuesioner keluarga terdiri dari 86 pertanyaan dan merekam kondisi dasar keluarga. Sementara itu, kuesioner desa merekam sarana yang tersedia di desa, yang terdiri dari 31 pertanyaan utama. Kuesioner keluarga seluruhnya dicacah oleh penduduk lokal. Oleh karena itu, kebanyakan pertanyaan terdiri dari pertanyaan sederhana dengan jawaban, "ya/tidak." Walaupun relatif sederhana, kuesioner tersebut sangat komprehensif. Dengan pelatihan yang memadai, penduduk lokal dapat menggunakan kuesioner untuk menghitung angka tingkat

The first weakness of both methods is the ease by which the data can be manipulated. Since the indicators are determined prior to actual data collection, it is relatively simple to alter a family's characteristics in order to classify the family as poor or not poor. Secondly, poverty is a very localized phenomenon, where characteristics of the poor differ between villages. Therefore, having a single checklist for an entire district, let alone a single list of indicators for the whole country, would surely introduce bias. The ideal scenario, therefore, would be to have a system that has the strengths of both methods, one that takes advantage of local knowledge and employs sophisticated methodology, while not having the weaknesses described above.

With this spirit in mind, the SMERU Research Institute set out to design and test a new method to identify the poor. Taking BKKBN's strengths, the new system heavily involves local residents in an area. Meanwhile, drawing on BPS' strengths, poverty indicators are designed to be sensitive to local conditions using a relatively advanced statistical calculation. Improving on the weaknesses of the two, the poverty indicators are determined after data collection is finished, thus negating any possibility of data tampering and hence specific poverty indicators at the village level can be determined. This new system is aptly called the Community-Based Monitoring System (CBMS).

Description of CBMS

CBMS uses two questionnaires for data collection based on family and village characteristics. The family questionnaire has 86 questions and records basic family conditions. Meanwhile, the village questionnaire records available facilities in the village, consisting of 31 main questions. The family questionnaire is completely enumerated by local residents. For this reason, the questionnaire consists mostly of simple questions with a "yes/no" answer. Although relatively simple, the questionnaire is quite thorough. Given enough training, the local residents can use the questionnaire to calculate figures such as school enrollment rates, contraception usage, and the unemployment rate, to name only a few. Therefore, the questionnaire can be used as a data source for other purposes in addition to poverty identification.

partisipasi sekolah, penggunaan kontrasepsi, pengangguran, dan lebih banyak lagi. Oleh karena itu, kuesioner dapat digunakan sebagai sumber data untuk keperluan lain selain identifikasi penduduk miskin.

SPKM banyak melibatkan masyarakat lokal karena jelas penduduk lokal mengetahui lebih banyak tentang kondisi desanya dibandingkan pihak luar. Lebih dari itu, partisipasi lokal menjamin bahwa kecil kemungkinan data mengandung informasi yang keliru karena responden akan lebih sulit memberi informasi yang tidak benar kepada tetangganya sendiri. Karenanya kualitas data terbilang tinggi. Namun, perlunya keikutsertaan masyarakat lokal mensyaratkan suatu sistem yang sederhana pada tahap pencacahan karena adanya perbedaan besar pada tingkat pendidikan dan kapasitas pengumpulan data di antara penduduk lokal. Selain itu, pelatihan yang komprehensif namun mudah dicerna wajib diberikan kepada para pencacah. Terakhir, tidak kalah penting adalah memastikan bahwa pencacah dibantu dan pekerjaannya diperiksa selama awal pencacahan untuk memastikan kesalahan yang terjadi diperbaiki dan tidak terulang.

Khusus untuk identifikasi penduduk miskin, kuesioner yang telah diisi harus dimasukkan datanya ke komputer untuk diproses dengan menggunakan metode statistik yang disebut Analisis Komponen Dasar (*Principal Components Analysis/PCA*). Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat setempat, namun dapat dilakukan di tingkat kabupaten. Hasil PCA ini berupa indikator kemiskinan yang peka terhadap kondisi lokal dan yang dapat membandingkan kesejahteraan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya di suatu desa. Karena indikator kemiskinan yang didapat bersifat relatif, maka hasil PCA ini tidak menentukan apakah sebuah keluarga miskin atau tidak miskin, melainkan hanya menentukan peringkat dari posisi setiap keluarga ketika diurutkan dari yang paling miskin hingga yang paling kaya. Sebaliknya, BKKBN menggunakan indikator kemiskinan absolut yang membandingkan kesejahteraan sebuah keluarga dengan standar kemiskinan atau kesejahteraan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Uji Coba SPKM

SMERU melakukan uji coba SPKM di empat desa pada 2005, yakni di Desa Cibulakan dan Desa Parakantugu di Kabupaten Cianjur, serta Desa Kedondong dan Desa Jungpasir di Kabupaten Demak. Uji coba ini dilaksanakan bekerja sama dengan BKKBN. BKKBN adalah mitra yang ideal karena sudah memiliki pencacah lokal di kebanyakan daerah, walaupun pada pascaotonomi daerah beberapa kantornya di daerah berstatus tidak jelas karena wewenangnya telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Keadaan ini juga menjadi pertimbangan pemilihan dua kabupaten tersebut. Dalam struktur pemerintah daerah, BKKBN di Cianjur sudah berstatus jelas, sementara BKKBN di Demak masih belum memiliki status jelas.

Pertemuan peneliti SMERU dengan pihak BKKBN dan aparat desa di Desa Cibulakan, Kabupaten Cianjur.
A SMERU researcher holds a meeting with a BKKBN official and village officials in Desa Cibulakan, Kabupaten Cianjur.

CBMS involves local people a great deal because it is clear that local residents always know more about the condition in their village compared to outsiders. Furthermore, local participation ensures that data is less likely to contain incorrect information, because residents usually find it harder to give false information to their own neighbor. Therefore, the data is of high quality. Insisting on local involvement, however, means that the system must be very simple at the enumeration stage, given the vast variations in education level and data collection capacity among local residents. Furthermore, it is also imperative to have a rigorous but straightforward training session for the enumerators. Finally, it is important to ensure that the enumerators are supported and their work checked during the initial enumeration period to ensure mistakes are corrected and not repeated.

Specifically for poverty identification, the questionnaire must be entered into a computer to be processed using a statistical method called Principal Components Analysis (PCA). Obviously, this cannot be conducted by local residents, but it can be conducted at the district level. The result of the PCA is the attainment of locally-sensitive poverty indicators, where the welfare of a family can be compared to other families in a village. Being a relative poverty indicator, PCA does not determine whether a family is poor or not, but determines where a family is placed when every family in the village is ranked from the poorest to the richest. In contrast, BKKBN uses an absolute poverty indicator, where a family's welfare is compared to a preset poverty or welfare standard.

Pilot Testing of CBMS

SMERU pilot tested CBMS in four villages in 2005: Desa Cibulakan and Desa Parakantugu in Kabupaten Cianjur, and Desa Kedondong and Desa Jungpasir in Kabupaten Demak. The pilot was undertaken in cooperation with BKKBN. BKKBN was an ideal partner because it already had local enumerators in most areas of the country. However, some BKKBN district offices have been in an uncertain position after regional autonomy era as some of their authority has been delegated to the district government. This is another reason for choosing the two kabupaten. While the BKKBN in Cianjur is already institutionalized, the BKKBN in Demak still has no official status in the district government structure.



Dok. SMERU/SMERU Doc.

Pelatihan yang komprehensif namun mudah dicerna wajib diberikan kepada para pencacah.
It is imperative to have a rigorous but straightforward training session for the enumerators.



Dok. SMERU/SMERU Doc.

Di setiap desa, kegiatan diawali dengan rekrutmen pencacah. Di Cianjur, tugas merekrut pencacah diserahkan pada petugas BKKBN. Sementara di Demak, di mana Kantor BKKBN sangat kekurangan dana, tugas ini dilakukan oleh kepala desa. Oleh karena itu, di Cianjur kebanyakan pencacah adalah pencacah BKKBN yang dikenal sebagai kader, sementara di Demak terdapat kombinasi dari mantan kader, guru, bidan, dan anggota kelompok perempuan desa. Persyaratan untuk menjadi pencacah adalah: pendidikan minimal sembilan tahun dan aktif dalam kegiatan sosial di desa. Persyaratan yang kedua sebagian besar dapat dipenuhi, namun persyaratan pertama terpaksa tidak diterapkan karena ternyata hanya sedikit yang dapat memenuhi syarat tersebut.

Pelatihan pencacah diadakan selama satu hari di kantor desa selama kira-kira tiga sampai empat jam. Setelah itu, pencacahan dimulai pada hari berikutnya dan selesai dalam waktu sekitar dua minggu dengan supervisi peneliti SMERU selama dua hari pertama. Setiap pencacah bertanggung jawab untuk mengumpulkan data di wilayah RTnya. Proses pelatihan dan pencacahan dibahas secara rinci dalam rubrik “Dari Lapangan.”

Setelah pencacahan usai, kuesioner dibawa ke Lembaga Penelitian SMERU untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data. Dalam kegiatan SPKM yang sebenarnya, proses ini akan dilakukan di kantor Bappeda atau BKKBN. Setelah selesai mengentri sekitar 5000 kuesioner (yang menghabiskan sekitar 200 jam orang kerja) selesai dilakukan, pelaksanaan PCA hanya membutuhkan waktu satu hingga dua hari untuk empat desa tersebut. Hasil PCA ini akan dijelaskan dalam rubrik “Data Berkata.”

Secara keseluruhan, uji coba SPKM memerlukan waktu lebih sedikit dari tiga bulan mulai dari rekrutmen hingga mendapatkan hasil PCA.

Pelajaran yang Didapat dari Keterlibatan Masyarakat Lokal

Tingkat pendidikan pencacah sangat berpengaruh dalam mengurangi kesalahan pengumpulan data, walau tidak sepenting tingkat entusiasme mereka. Pencacah yang berpendidikan lebih tinggi kurang cermat dibanding pencacah yang memiliki entusiasme namun berpendidikan lebih rendah. Salah satu contoh adalah aparat desa. Aparat dari dua desa tidak terlalu antusias untuk melakukan pengumpulan data (mereka sepakat melakukannya karena mendapatkan imbalan) dan tidak menganggap penting pengisian kuesioners secara benar. Akibatnya, kualitas pencacahan mereka relatif lebih rendah dan mereka cenderung lebih banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, peneliti SMERU harus memeriksa kuesioner dari aparat desa dengan lebih seksama.

In each village, the activity started with the recruitment of enumerators. In Cianjur, the task of recruiting enumerators was left to BKKBN officials. Meanwhile, in Demak, where the BKKBN District Office is severely underfunded, the task was mostly undertaken by the head of the village. Therefore, in Cianjur most of the enumerators are BKKBN enumerators, known as cadres, while in Demak it was a mix of ex-cadres, teachers, midwives, and village women’s group members. The enumerators’ requirements were that they have at least nine years of education and be socially active. While the latter requirement was largely met, the former had to be waived because it turned out that there were not enough people with such an education level in the villages.

Training of enumerators took place in one day in the village offices for approximately three to four hours. Then, enumeration started the next day and was completed in around two weeks with SMERU researchers supervising for the first two days. Every enumerator was in charge of collecting data in the neighborhood where she or he lived. The training and enumeration processes are discussed in detail in the “From the Field” column.

After the enumeration was completed, the questionnaires were sent to SMERU and were entered into a database. In the actual CBMS, this process would take place in the district Bappeda (Regional Development Planning Board) or BKKBN office. After the data entry of 5000 questionnaires (which had taken around 200 staff-hours) had been completed, executing the PCA only took around one to two days for all four villages. The PCA results will be discussed in the “And the Data Says” column.

In total, the CBMS pilot test took a little more than three months from recruitment to getting the PCA results.

Lessons Learned from Local Involvement

The education level of the enumerators is quite influential in limiting mistakes during data collection, although it is not as important as their level of enthusiasm. More educated enumerators were less accurate than more enthusiastic enumerators with lower education levels. A good example is the village officials. The officials in two of the four villages were not particularly enthusiastic about conducting data collection (they agreed to do it because of the remuneration) and did not take the importance of correctly filling out the questionnaire seriously. As a result, the quality of their enumeration is relatively lower and they are more prone to making mistakes than the rest. SMERU researchers, therefore, had to check their questionnaires more thoroughly.

Walaupun masih terasa perlunya perbaikan, SMERU menilai bahwa kuesioner ini cukup mudah untuk digunakan oleh penduduk lokal. Kami amati bahwa petugas BKKBN di tingkat desa dan kecamatan (PLKB dan PPLKB)¹ memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam memobilisasi penduduk lokal dan mensupervisi pengawasan data. Di sisi lain, aparat desa seharusnya tidak dilibatkan untuk menghindari manipulasi data. Di tingkat kabupaten, komitmen dari institusi-institusi pemerintah selain BKKBN diperlukan, terutama di daerah-daerah di mana BKKBN tidak aktif.

Temuan Umum dan Kesimpulan

Tujuan uji coba SPKM ini adalah untuk memperkenalkan sistem pemantauan kemiskinan yang lebih handal kepada pembuat kebijakan di Indonesia. Mengingat luas wilayah Indonesia serta jumlah penduduknya yang besar, sangat penting bahwa sistem yang baru ini mudah dilaksanakan dan dapat diproses dengan cepat untuk memberi para pemangku kepentingan informasi mengenai keadaan kemiskinan suatu daerah.

Karena kemiskinan sebagian besar merupakan fenomena lokal, sistem yang diperkenalkan uji coba ini bersifat peka terhadap kondisi kemiskinan lokal dan menjamin keikutsertaan secara aktif penduduk lokal dalam pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat lokal juga penting karena dengan demikian sistem ini dapat dilakukan secara serempak di seluruh desa di Indonesia. Artinya sangat mungkin bahwa pengumpulan data di seluruh Indonesia bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari sebulan. Selain itu, SMERU telah menunjukkan bahwa dengan dukungan dan supervisi yang memadai, penduduk lokal dapat melaksanakan pemantauan kemiskinan secara mandiri.

Dengan memperkenalkan SPKM, diharapkan pemangku kepentingan yang tertarik menyadari bahwa tersedia sistem pemantauan kemiskinan yang relatif akurat, melibatkan masyarakat lokal, menonjolkan kekhasan karakteristik lokal, namun tetap objektif, dan bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah. SPKM akan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memantau perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah selama periode tiga hingga empat tahun. Pada akhirnya, hal ini akan membantu upaya-upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki kesejahteraan penduduknya. ■ **Daniel Suryadarma**

SMERU melibatkan kepala desa setempat di setiap desa uji coba SPKM.
SMERU involved the village head of each CBMS pilot village.

Although there is still room for improvement, we find that our questionnaire is simple enough to be administered by local residents. We note that BKKBN officials at village and sub-district levels (PLKB and PPLKB)¹ have the potential to play a crucial role in mobilizing local residents and supervising data collection. On the other hand, village officials should not be involved in order to ensure that data is not tampered with. At the district level, commitment from government agencies other than BKKBN is necessary, especially in areas where BKKBN is not in an active state.

General Findings and Conclusions

The purpose of this CBMS pilot project is to introduce a better poverty monitoring system to policymakers in Indonesia. Given Indonesia's size, in both geographical and population terms, it is important that the new monitoring system is easy to administer and can be expeditiously processed to provide the stakeholders with information on poverty conditions of an area.

Since poverty is very much a local phenomenon, the new system introduced by this pilot project is sensitive to local poverty conditions and ensures that local residents play a significant role in carrying it out. Involvement of local people is important for another reason: the system can be conducted simultaneously in every village in Indonesia. This means that there is a possibility that data collection for the whole country could be completed in less than a month. Furthermore, SMERU has also demonstrated that given enough support and supervision, local people were able to conduct their own poverty monitoring.

*By introducing CBMS, we hope that interested stakeholders will be aware that there is a poverty monitoring system that is relatively accurate, involves local people, is specific to local characteristics while remaining objective, and is feasible to be undertaken by the district governments. CBMS will enable stakeholders to monitor changes in the welfare level of a given area over a period of three to four years. Ultimately, this can help the district government in efforts to more effectively improve the welfare of their people. ■ **Daniel Suryadarma***



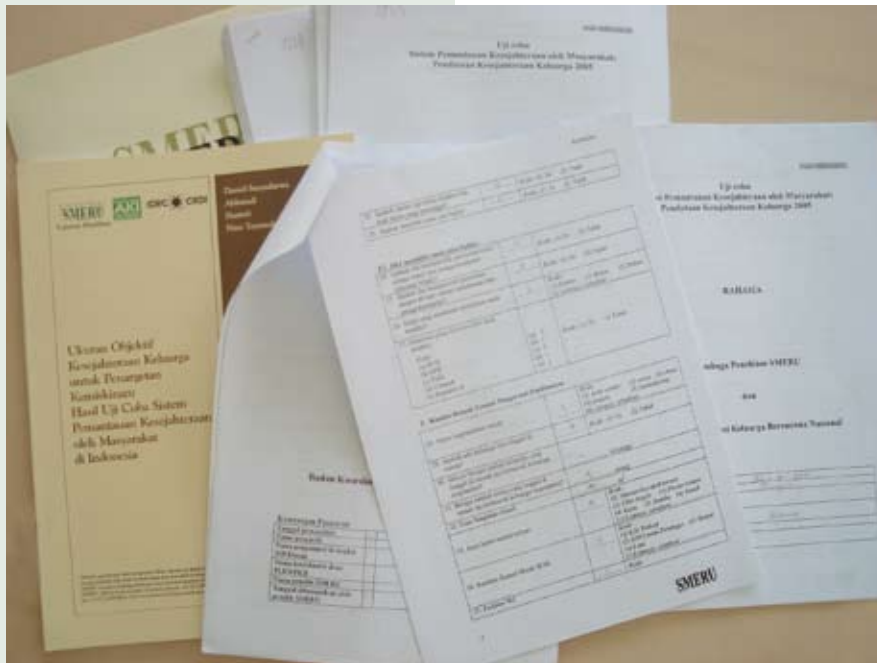
Dok. SMERU/SMERU Doc.

¹ PLKB: Petugas Lapangan Keluarga Berencana; PPLKB: Penyelia Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

¹ PLKB: Family Planning Field Worker; PPLKB: Family Planning Field Worker's Supervisor.

MENGIDENTIFIKASI INDIKATOR KEMISKINAN SPESIFIK-LOKAL DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS KOMPONEN DASAR (PCA)

IDENTIFYING LOCALLY-SPECIFIC POVERTY INDICATORS BY USING PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS (PCA)



Dok. SMERU/SMERU Doc.

Mengapa PCA?

Tujuan utama Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM) adalah untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan dalam suatu daerah dan mencari cara untuk menanggulangnya sesuai dengan kondisi lokal yang dihadapi. Dengan mengidentifikasi orang miskin melalui pelaksanaan SPKM, dapat diperoleh ketepatan penargetan penerima program bantuan yang lebih baik. Untuk mengidentifikasi secara objektif siapa saja penduduk miskin ketika dibandingkan dengan penduduk yang lain, SPKM menggunakan metode statistik yang disebut Analisis Komponen Dasar yang disingkat PCA (*Principal Components Analysis*).

PCA pada dasarnya adalah suatu metode statistik untuk memperkecil keragaman dimensi dalam data, namun tetap mempertahankan keragaman dalam data setinggi mungkin. Sebagai contoh, dalam masalah yang berdimensi dua, terdapat dua variabel, yakni X dan Y. Skor komponen dasar pertama merupakan garis yang paling tepat merepresentasi keragaman bersama X dan Y. Oleh karena itu, PCA dapat menghitung konsep kesejahteraan yang multidimensional, di mana kesejahteraan keluarga ditentukan oleh banyak faktor.

Why PCA?

The main purpose of the Community-Based Monitoring System (CBMS) is to identify conditions of poverty in an area and find ways to reduce it in a local setting. By identifying the poor through the implementation of CBMS, better targeting accuracy of beneficiaries of assistance programs can also be achieved. In order to objectively identify which residents are poor compared to other residents in an area, CBMS uses a statistical method called Principal Components Analysis (PCA).

PCA is basically a statistical method that reduces the multidimensionality of a dataset while retaining the variation in the dataset as much as possible. For example, in a two-dimensional problem, there are two variables X and Y. The first principal component score shows a line that best represents the common variability of X and Y. Therefore, PCA is able to calculate multidimensional welfare concept, where a family's welfare is determined by many factors.

Selain itu, dengan menggunakan PCA, masalah manipulasi data juga dapat dihindari karena data mana yang digunakan sebagai indikator tidak diketahui sebelum tahap analisis. Kondisi kemiskinan dan peringkat kesejahteraan keluarga dalam desa baru diketahui pada tahap akhir analisis data.

Artikel ini akan menguraikan hasil pemrosesan data SPKM yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU dengan menggunakan metode PCA.

Hasil PCA di Desa-deso Lokasi SPKM

Kuesioner keluarga SPKM terdiri dari 86 pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, SMERU menentukan 63 indikator kesejahteraan. Indikator-indikator ini mencakup tingkat pendidikan, pekerjaan, perilaku kesehatan, imunisasi bayi, pola konsumsi, kepemilikan aset, partisipasi politik, dan akses terhadap informasi. Untuk mempertahankan kesederhanaan sistem ini, semua indikator disusun dalam bentuk jawaban ya/tidak.

SMERU melaksanakan PCA untuk data SPKM dari empat desa, yakni Desa Parakantugu dan Desa Cibulakan di Kabupaten Cianjur serta Desa Kedondong dan Desa Jungpasisir di Kabupaten Demak. Hasilnya, masing-masing dari 63 indikator memiliki nilai bobotnya sendiri-sendiri di setiap desa, yang menunjukkan pentingnya indikator tersebut dalam mengukur kesejahteraan keluarga di suatu desa. Suatu variabel dengan bobot absolut yang lebih tinggi merupakan indikator kesejahteraan yang lebih penting dibanding variabel dengan bobot absolut yang lebih rendah. Tabel 1 menampilkan 10 indikator yang memiliki bobot tertinggi bagi dua desa di Kabupaten Cianjur. Sebagai catatan, variabel yang bobotnya minus menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki karakteristik tersebut cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibanding keluarga yang tidak memilikinya.

Secara umum, variabel kepemilikan aset adalah prediksi yang paling kuat mengenai kondisi kemiskinan di setiap desa, meskipun terdapat perbedaan yang cukup menonjol dalam jenis asetnya. Ada juga indikator kemiskinan nonaset (berdasarkan variabel bukan aset). Di Desa Parakantugu hanya satu variabel nonaset yang masuk dalam peringkat 10 besar, yakni tingkat pendidikan kepala keluarga, sementara di Desa Cibulakan, pola konsumsi masuk dalam peringkat 10 besar variabel yang berbobot tertinggi.

Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa terdapat indikator kemiskinan yang berbeda antardesa. Lebih penting lagi, indikator spesifik-lokal ini dapat diungkap melalui metodologi yang digunakan SMERU.

Sebuah rumah di Desa Parakantugu, salah satu lokasi uji coba SPKM yang dilaksanakan SMERU
A house in Desa Parakantugu, one of SMERU's CBMS pilot test sites.

Furthermore, by using PCA we can also eliminate the problem of data tampering because the data that is used as indicators is not known prior to analysis. The poverty condition and family welfare rank in the village will be identified at the end of the data analysis phase.

This article discusses the results of CBMS data processing conducted by The SMERU Research Institute using the PCA method.

PCA Results in CBMS Villages

The CBMS family questionnaire contains 86 questions. Out of these questions, SMERU determined 63 welfare indicators. The indicators include education levels, employment, health practices, immunization for infants, consumption pattern, asset ownership, political participation, and access to information. To maintain the simplicity of the system, all indicators are in the form of yes/no answers.

SMERU ran PCA for CBMS data of four villages, Desa Parakantugu and Desa Cibulakan in Kabupaten Cianjur and Desa Kedondong and Desa Jungpasisir in Kabupaten Demak. In the results, each of the 63 indicators have their own weighting in each village, which shows the importance of that indicator in measuring family welfare in a village. A variable with a higher absolute weight means that it is a more important welfare determinant compared to variables with lower absolute weights. Table 1 shows the ten highest weighted indicators for the two villages in Kabupaten Cianjur. Note that a negatively weighted variable means that families with that characteristic tend to have lower welfare levels compared to other families without it.

In general, asset ownership variables are the best predictors of poverty in each village, though there are quite discernible differences in the types of assets. There are also non-asset poverty indicators. In Desa Parakantugu only one non-asset variable is in the top ten: the education level of family head, while in Desa Cibulakan consumption pattern is included in the ten highest weighted variables.

Thus, the pilot project provided evidence that there are, indeed, different poverty indicators between villages. More importantly, these locally-specific indicators can be revealed using the methodology SMERU employed.



Dok. SMERU/SMERU Doc.

Perbandingan Keluarga Terkaya dan Termiskin

PCA memungkinkan kita untuk menyusun peringkat kesejahteraan keluarga dalam sebuah desa. Oleh karena itu, keandalan PCA juga dapat dibuktikan dengan membandingkan karakteristik keluarga yang paling kaya dengan yang paling miskin. Tabel 2 membandingkan karakteristik dari 10% keluarga terkaya dan 10% keluarga termiskin di Desa Cibulakan. Di Desa Cibulakan terdapat 1430 keluarga, maka tabel ini membandingkan karakteristik 143 keluarga terkaya dan 143 keluarga termiskin di desa tersebut. Karena jenis kepemilikan aset antara dua kelompok tersebut jelas sangat berbeda, informasi mengenai aset tidak ditampilkan dalam tabel.

Comparison of the Richest and Poorest Families

PCA allows one to rank family welfare in a village. Therefore, another way to prove the reliability of PCA is by comparing the characteristics of the richest and poorest families in a village. Table 2 compares the characteristics of the richest 10% families and poorest 10% of all families in Desa Cibulakan. There are 1430 families in Desa Cibulakan, so this table compares the characteristics of the richest 143 families with the poorest 143 families there. Since asset ownership between the two groups are obviously markedly different, this information is excluded from the table.

**Table 1. Sepuluh Variabel Berbobot Tertinggi di Desa Uji Coba SPKM/
Table 1. Ten Highest-weighted Variables in CBMS Pilot Project Villages**

Desa Parakantugu		Desa Cibulakan	
Variabel/Variable	Bobot /Weight	Variabel/Variable	Bobot /Weight
1. Memiliki kulkas/ <i>Own refrigerator</i>	0,26	1. Memiliki kulkas/ <i>Own refrigerator</i>	0,26
2. Memiliki telepon/ <i>Own telephone</i>	0,25	2. Memiliki TV berwarna/ <i>Own color television</i>	0,26
3. Memiliki tabungan/ <i>Own savings</i>	0,24	3. Memiliki telepon/genggam/ <i>Own cellular phone</i>	0,26
4. Memiliki kipas angin/ <i>Own fan</i>	0,24	4. Memiliki DVD/VCD player/ <i>Own DVD/VCD player</i>	0,23
5. Memiliki antena parabola/ <i>Own satellite dish</i>	0,24	5. Memiliki kipas angin/ <i>Own fan</i>	0,22
6. Memiliki DVD/VCD player/ <i>Own DVD/VCD player</i>	0,24	6. Memiliki tabungan/ <i>Own savings</i>	0,22
7. Memiliki TV berwarna/ <i>Own color television</i>	0,24	7. Memiliki alat perekam/ <i>Own tape recorder</i>	0,20
8. Memiliki kendaraan bermotor roda dua/ <i>Own motorcycle</i>	0,21	8. Menggunakan WC pribadi/ <i>Use private toilet</i>	0,20
9. Pendidikan kepala keluarga: SD/ <i>Family head education: elementary school</i>	-0,20	9. Makan daging sedikitnya sekali seminggu <i>Eat meat at least once a week</i>	0,18
10. Memiliki alat perekam/ <i>Own tape recorder</i>	0,19	10. Memiliki kendaraan bermotor roda dua/ <i>Own motorcycle</i>	0,18

Tingkat pendidikan kepala keluarga kaya sangat berbeda dengan keluarga miskin. Sebanyak 99% kepala keluarga kaya menyelesaikan pendidikan sedikitnya enam tahun di sekolah dasar. Selain itu, 33% dan 20% dari kepala keluarga kaya menyelesaikan pendidikan di sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi. Sebaliknya, tidak ada kepala keluarga miskin yang mengenyam pendidikan lebih tinggi dari tingkat SLTP.

The education level of the heads of rich families is significantly different from poor families. Some 99% of rich family heads finished at least six years of formal schooling. Moreover, 33% and 20% of the rich finished senior secondary and tertiary level education respectively. In contrast, none of the poor family heads finished higher than junior secondary level.

Dalam hal pekerjaan, semua kepala keluarga keluarga kaya memiliki pekerjaan, sementara hanya 61% kepala keluarga miskin bekerja. Terdapat beberapa pasangan keluarga kaya atau miskin yang bekerja, namun proporsinya pada keluarga kaya jauh lebih tinggi daripada keluarga miskin. Terdapat 28% pasangan keluarga kaya yang bekerja, sementara pada keluarga miskin hanya 12%.

In terms of employment, every family head among the rich families has a job, while only 61% of poor family heads are employed. There are, however, few working spouses among either rich or poor families, but the proportion among the rich is much higher than among the poor. There are 28% and 12% of rich and poor spouses respectively who work.

Juga terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal pola konsumsi. Walaupun hampir setiap keluarga makan dua kali sehari, asupan proteinnya sangat berbeda. Lebih dari 90% keluarga kaya mengonsumsi daging, ikan, dan telur setidaknya satu kali seminggu. Sementara itu, secara berturut-turut, hanya 14%, 34%, dan 41% keluarga miskin mengonsumsi daging, ikan, dan telur sekali seminggu.

There are also considerable contrasts in terms of consumption patterns. Although just about every family eats two meals a day, the protein intake is very different. More than 90% of rich families consume meat, fish, and egg at least once a week, while only 14%, 34%, and 41% of poor families consume meat, fish, and eggs respectively once in a week.

**Tabel 2. Karakteristik 10% Keluarga Terkaya dan Termiskin di Desa Cibulakan/
Table 2. Characteristics of the Richest 10% and the Poorest 10% of all Families in Cibulakan**

Kelompok Variabel/ Variable group	Variabel/Variable	10% Keluarga terkaya/ Richest 10%	10% Keluarga termiskin/ Poorest 10%
Status perkawinan/ <i>Marital status</i>	Kepala keluarga berstatus menikah/ <i>Family head is married</i>	99.31	33.57
Jenis kelamin kepala keluarga/ <i>Sex of family head</i>	Kepala keluarga perempuan/ <i>Family head is female</i>	1.39	58.04
Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangan/ <i>Family head's and spouse's education level</i>	Pendidikan kepala keluarga: SD/ <i>Family head education: elementary</i>	34.72	60.14
	Pendidikan kepala keluarga: SLTP/ <i>Family head's education: junior secondary school</i>	10.42	0.70
	Pendidikan kepala keluarga: SLTA/ <i>Family head's education: senior secondary school</i>	33.33	0
	Pendidikan kepala keluarga: diploma/ <i>Family head's education: diploma</i>	9.72	0
	Pendidikan kepala keluarga: universitas/ <i>Family head's education: university</i>	10.42	0
	Pendidikan pasangan: SD/ <i>Spouse education: elementary school</i>	2.08	20.98
	Pendidikan pasangan: SLTP/ <i>Spouse education: junior secondary school</i>	43.06	12.59
	Pendidikan pasangan: SLTA/ <i>Spouse education: senior secondary school</i>	13.19	0
	Pendidikan pasangan: diploma/ <i>Spouse education: diploma</i>	30.56	0
	Pendidikan pasangan: universitas/ <i>Spouse education: university</i>	5.56	0
Anggota keluarga yang bekerja/ <i>Working members of the family</i>	Kepala keluarga bekerja/ <i>Family head is working</i>	100.00	60.84
	Pasangan bekerja/ <i>Spouse is working</i>	27.78	11.89
	Sedikitnya satu anak usia sekolah yang bekerja/ <i>At least one school-age child is working</i>	1.39	2.80
Sektor pekerjaan/ <i>Sector of employment</i>	Keluarga bekerja di sektor pertanian/ <i>Family working in agriculture sector</i>	9.03	54.55
	Keluarga bekerja di sektor industri/ <i>Family working in industrial sector</i>	2.78	1.40
	Keluarga bekerja di sektor perdagangan/ <i>Family working in trade sector</i>	22.92	4.90
	Keluarga bekerja di sektor jasa/ <i>Family working in services sector</i>	60.42	2.80
	Menerima kiriman/transfer dana (tidak bekerja)/ <i>Family receiving transfer (unemployed)</i>	4.86	36.36
Akses terhadap lembaga keuangan/ <i>Access to financial institutions</i>	Memiliki tabungan/ <i>Own savings</i>	67.36	0.70
	Menerima kredit dari lembaga keuangan formal selama tiga tahun terakhir/ <i>Received credit from a formal financial institution in the past three years</i>	32.64	0
	Menggadaikan aset selama tiga tahun terakhir/ <i>Pawned assets in the past three years</i>	6.25	0
	Harus menjual aset untuk melunasi utang/ <i>Had to sell assets to pay debts</i>	4.86	0

Kelompok Variabel/ Variable group	Variabel/Variable	10% Keluarga terkaya/ Richest 10%	10% Keluarga termiskin/ Poorest 10%
Konsumsi makanan dan indikator kesehatan/ <i>Food consumption and health indicators</i>	Makan dua kali sehari/ <i>Eat two meals a day</i>	97.92	97.20
	Mengonsumsi daging sedikitnya sekali seminggu/ <i>Eat meat at least once a week</i>	90.97	13.99
	Mengonsumsi ikan sedikitnya sekali seminggu/ <i>Eat fish at least once a week</i>	96.53	33.57
	Mengonsumsi telur sedikitnya sekali seminggu/ <i>Eat egg at least once a week</i>	98.61	40.56
	Mengupayakan pengobatan medis modern ketika sakit/ <i>Seek modern medical treatment when sick</i>	95.14	74.83
	Meminum air dari sumber air yang aman/ <i>Drink safe water</i>	94.44	49.65
	Menggunakan WC pribadi/ <i>Use private toilet</i>	95.14	13.29
	Luas rumah keluarga lebih dari 8 meter persegi per kapita/ <i>Family house size is more than 8 square meters per capita</i>	94.44	82.52
	Tinggal di rumah berlantai tanah/ <i>Live in dirt floor house</i>	0	0.70
	Pernah mengalami kematian bayi selama tiga tahun terakhir/ <i>Experienced death of an infant in the past three years</i>	5.56	0.70
Indikator kesejahteraan lain/ <i>Other welfare indicators</i>	Menggunakan sumber energi listrik untuk penerangan/ <i>Use electric light</i>	100	94.41
	Sedikitnya satu anak usia sekolah yang putus sekolah/ <i>At least one school-age child dropped out of school</i>	14.58	21.68
	Angka ketergantungan tinggi (lebih dari separo anggota keluarga di bawah usia 15 tahun)/ <i>High dependency rate (more than half of family members are younger than 15 years old)</i>	10.42	7.69
	Kebanyakan anggota keluarga membeli pakaian baru setidaknya sekali setahun/ <i>Most family members buy new clothes at least once a year</i>	95.14	41.96
	Pernah menjadi korban kejahatan selama setahun terakhir/ <i>Victim of crime in the past year</i>	4.86	1.40
Partisipasi politik dan akses pada informasi/ <i>Political participation and access to information</i>	Setidaknya satu anggota keluarga pernah ikut dalam pemilu yang terakhir dilaksanakan/ <i>At least one family member voted in the last general election</i>	99.31	92.31
	Menonton TV atau membaca surat kabar sedikitnya sekali seminggu/ <i>Watch television or read newspaper at least once a week</i>	100	44.06
Jumlah Keluarga/Number of families		143	143

Indikator perilaku kesehatan antara keluarga kaya dan keluarga miskin juga tampak sangat berbeda. Sebanyak 95% keluarga kaya mengupayakan layanan kesehatan modern selama sakit, sementara keluarga miskin hanya 75%. Persentase keluarga kaya yang mengonsumsi air bersih dua kali lebih besar dibandingkan keluarga miskin. Dalam hal fasilitas WC pribadi, 95% keluarga kaya telah memiliki WC pribadi dan hanya 13% keluarga miskin memiliki WC pribadi, sisanya menggunakan WC umum atau memakai WC tetangga. Kebanyakan keluarga kaya memiliki luas rumah sekurang-kurangnya 8 m² per kapita persegi dan 1% keluarga miskin masih tinggal di rumah berlantai tanah.

Kesimpulan

Salah satu faktor yang paling membedakan SPKM dengan metodologi BKKBN atau uji pendekatan kemampuan yang digunakan dalam Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) adalah bahwa indikator kemiskinan ditentukan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Selain itu, SPKM memberikan penilaian kemiskinan yang lebih rinci karena dapat menentukan indikator kemiskinan yang spesifik di tingkat desa. Hal ini penting karena kemiskinan didorong oleh penyebab-penyebab yang spesifik-lokal.

Perbedaan utama lainnya adalah bahwa PCA mengukur kemiskinan relatif, sementara BKKBN dan BPS mengukur kemiskinan absolut. Oleh karena itu, PCA tidak dapat memberi angka tingkat kemiskinan di sebuah desa, tetapi hal itu memang bukan tujuan SPKM. Tujuan utama SPKM adalah untuk mengidentifikasi keluarga mana yang termiskin sehingga harus mendapat bantuan pemerintah. PCA mampu memenuhi tujuan ini karena dapat memeringkat keluarga di desa dari tingkat kesejahteraan yang paling tinggi ke tingkat yang paling rendah.

Salah satu cara menguji keakuratan skor kesejahteraan adalah dengan membandingkan karakteristik keluarga yang kaya dan miskin. Ditemukan bahwa di semua desa terdapat kesenjangan yang tinggi antara mereka yang dikategorikan kaya dan miskin pada setiap indikator. Dapat disimpulkan bahwa metodologi yang digunakan SMERU telah berhasil mengidentifikasi keluarga miskin di setiap desa.

Dalam uji coba ini, SMERU menemukan bahwa PCA juga bisa digunakan untuk memeringkat kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan atau kabupaten. Di masa yang akan datang, rencana pembangunan di tingkat kabupaten akan dapat mengetahui secara tepat keluarga mana yang harus menerima bantuan program menurut kuota yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah.

■ **Daniel Suryadarma**

Kuesioner SPKM cukup mudah digunakan oleh penduduk lokal.

The CBMS questionnaire is user-friendly enough for the local community.

Health practice indicators between rich and poor families are also very different. Around 95% of rich families seek modern health services during sickness, while only 75% of poor families do so. The percentage of rich families drinking safe water is twice that of the poor. In terms of toilet facilities, 95% of rich families have a private toilet and only 13% of poor families have one, the rest use public toilets or their neighbor's. Furthermore, more rich families have at least 8 m² per capita in house size and 1% of poor families still live in a dirt floor house.

Conclusion

One of CBMS' most significant differentiating factors compared to the BKKBN methodology or UCT's¹ proxy means testing, is the fact that the poverty indicators are determined after data collection is finished. Furthermore, CBMS provides a more detailed poverty assessment because it is able to determine specific poverty indicators even at the village level. This is crucial since poverty is known to be driven by locally-specific causes.

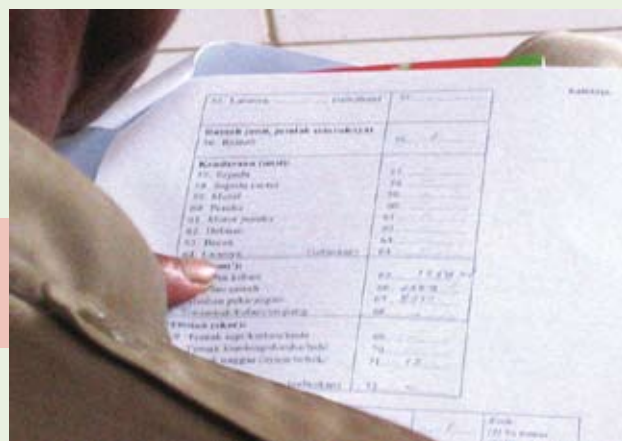
Another major difference is that PCA measures relative poverty, while BKKBN and BPS measure absolute poverty. PCA does not, therefore, provide the poverty rate in a village. However, this is not the objective of CBMS. The main purpose of CBMS is to find out which families are the poorest, and hence should be assisted by the government. PCA perfectly fills this purpose as it enables the ranking of families in a village from the highest to the lowest welfare levels.

One way of testing the strength of the welfare score is by isolating the richest and the poorest families and by looking at their characteristics. In all villages, it was found that there is, indeed, a wide gap between those categorized rich and those categorized poor in almost every indicator. In conclusion, SMERU believes that the methodology it selected is successful in enabling us to identify the poor in every village.

In the pilot project, SMERU found that it was also possible to use PCA to rank family welfare in a kecamatan or a kabupaten. In the future, therefore, a planner at the district level would know exactly which families should receive government assistance programs according to the quota allocated by the central and regional government.

■ **Daniel Suryadarma**

¹ UCT: Unconditional Cash Transfer Program.



Dok. SMERU/SMERU Doc.

PENDATAAN DALAM SISTEM PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN OLEH MASYARAKAT

DATA COLLECTION IN THE COMMUNITY-BASED MONITORING SYSTEM



Dok. SMERU/SMERU Doc.

Dalam melakukan pendataan, pendata merupakan faktor yang memengaruhi akurasi data yang dikumpulkan. Kemampuan pendata dalam melakukan wawancara dan memahami pertanyaan atau informasi yang akan digali sangat menentukan kualitas informasi. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan saat pendataan, antara lain dilakukan pemilihan pendata dan pemberian pembekalan yang memadai bagi pendata, baik melalui penyelenggaraan pelatihan maupun melalui pembimbingan lapangan pada saat pendataan dilaksanakan.

Tulisan berikut memaparkan pengalaman SMERU dalam memfasilitasi pelaksanaan uji coba pendataan keluarga melalui pendekatan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKM) di empat desa, yaitu Desa Cibulakan dan Desa Parakantugu di Kabupaten Cianjur, serta Desa Kedondong dan Desa Jungpasir di Kabupaten Demak.

Pemilihan Pendata

Dalam pendataan dengan pendekatan SPKM, pelibatan masyarakat setempat merupakan hal utama karena sistem ini menekankan pada pemanfaatan pengetahuan lokal. Pelibatan masyarakat setempat tidak sekadar menjadi faktor pendukung terlaksananya pendataan, akan tetapi sekaligus menjadi tujuan SPKM.

In conducting data collection, the enumerator is a factor that influences the accuracy of the data collected. The capability of the enumerator in conducting interviews and understanding the questions or information to be uncovered will very much determine the quality of the information. Therefore, to reduce the possibility of errors occurring in the data collection, a selection of enumerators was conducted and adequate skills were provided for the enumerators, through training as well as field supervision during the data collection.

The following article relates the experience of SMERU in facilitating the implementation of the pilot project on family data collection through the Community-Based Monitoring System (CMBS) approach in four villages, namely Desa Cibulakan and Desa Parakantugu in Kabupaten Cianjur and Desa Kedondong and Desa Jungpasir in Kabupaten Demak.

The Selection of Enumerators

In the CBMS data collection approach, the involvement of the local community is the main issue, because this system stresses the benefit of local knowledge. The involvement of the local community is not just to support the conduct of the data collection, but is an objective of the CBMS itself.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, pemilihan pendata, baik cara maupun jumlahnya, diserahkan sepenuhnya kepada aparat di daerah. Aparat hanya diberi pedoman umum bahwa pendata yang akan dipilih sebaiknya telah memiliki pengalaman dalam melakukan pendataan dan tempat tinggalnya tersebar. Karena uji coba ini diselenggarakan atas kerja sama dengan BKKBN, pemilihan pendata dilakukan oleh staf BKKBN tingkat kecamatan dan desa, dengan mempertimbangkan masukan dari aparat desa setempat. Mereka juga menentukan jumlah beban dan pembagian wilayah kerja masing-masing pendata berdasarkan ketersediaan waktu dan tempat tinggal pendata.



Jumlah masyarakat di tingkat desa yang memiliki kapasitas memadai untuk menjadi pendata memang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pendata SPKM diutamakan kader BKKBN yang sudah berpengalaman melakukan pendataan keluarga untuk kepentingan BKKBN. Beberapa di antara mereka juga pernah terlibat dalam kegiatan pendataan untuk kepentingan dinas kesehatan dan lembaga lainnya (lihat Boks 2). Apabila jumlah kader di suatu desa tidak mencukupi, maka dipilih pendata lain dengan mempertimbangkan kriteria berikut:

- mempunyai tingkat pendidikan minimal tamatan SLTP,
- mempunyai pengalaman dalam melakukan pendataan masyarakat,
- cukup aktif dalam kegiatan masyarakat atau cukup dikenal dan mengenal masyarakat setempat,
- lokasi tempat tinggal pendata dapat mengisi kekosongan wilayah yang tidak diisi kader.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terpilih sejumlah pendata yang akan melakukan pendataan keluarga di wilayah kerjanya masing-masing sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan di tingkat desa. Deskripsi tentang jumlah dan karakteristik pendata SPKM di empat desa uji coba disajikan pada Boks 1.

Pelatihan Pendata

Untuk memberikan pemahaman kepada para pendata tentang bahan yang akan digunakan dalam pendataan dan untuk menyamakan persepsi tentang informasi yang akan dikumpulkan, dilaksanakan pelatihan di setiap kantor desa selama setengah hari. Pelatihan dilaksanakan oleh SMERU dan BKKBN setempat, serta aparat di masing-masing desa uji coba.

Pelaksanaan pelatihan dibagi dalam tiga sesi, yaitu penyampaian materi, praktek tanya jawab kuesioner, serta pembagian wilayah dan beban kerja. Materi pelatihan yang disampaikan mengacu pada buku "Pedoman bagi Pencacah" yang dibagikan kepada semua pendata, yakni terdiri dari penjelasan latar belakang dan tujuan pendataan, konsep-konsep yang digunakan, dan cara mengisi kuesioner. Setiap pertanyaan dalam kuesioner dibahas satu per satu dan didiskusikan secara mendalam hingga pendata memahami dan mengerti maksud dari setiap pertanyaan. Dalam sesi ini juga dilakukan penyamaan

In the implementation of this pilot project, the selection of enumerators, both the means and the numbers, was fully devolved to regional authorities. The authorities were only given a general instruction that the enumerators selected should have experience in data collection and that their places of residence be widely dispersed. Because the pilot project was undertaken in cooperation with BKKBN,¹ the selection of enumerators was undertaken by BKKBN staff at the kecamatan and village level, with consideration given to the input of local village officials. They also determined the workload and distribution of collection areas of each enumerator based on their time availability and where they lived.

The number of residents at the village level who have an adequate capacity to conduct data collection is, indeed, still quite limited. For that reason, the selection of CBMS enumerators gave priority to BKKBN cadres who are already experienced in collecting family data for BKKBN. Several of them have also been involved in data collection activities for regional health agencies and other institutions (see Box 2). When the number of cadres in one village was insufficient, other enumerators were chosen based on the following criteria:

- *having a minimum level of education of a junior high school graduate,*
- *having experience in community data collection,*
- *being quite active in community activities or knowing and being known by the local community,*
- *the area where the enumerators live can fill regional vacancies that can't be filled by cadres.*

Based on these considerations, a number of enumerators were chosen who would undertake the family data collection in their respective working area in accordance with the agreement at the village level. Description of the number and characteristics of the CBMS enumerators in the four pilot villages are presented in Box 1.

Training of Enumerators

To provide the enumerators with an understanding of the material that would be used in the data collection and establish a common perception on the information that will be gathered, a half-day training program was undertaken in each village office. The training was conducted by SMERU and the local BKKBN, as well as the authorities in the respective test pilot villages.

The training was divided into three sessions: lectures on the training material, practicing the questionnaire's questions and answers, and determining the distribution of areas and workloads. The training material delivered referred to the "Guidelines for Enumerators" that was distributed to all enumerators. This consisted of an explanation of the background and objectives of the data collection, the concepts used, and the method for completing the questionnaire. Each question in the

¹ BKKBN: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (National Family Planning Coordination Board).

persepsi terhadap masing-masing pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner. Peserta juga dilatih agar dapat menjelaskan tentang tujuan pendataan kepada keluarga yang menjadi responden dan teknik mewawancarai mereka.

Setelah sesi penyampaian materi tuntas, pelatihan dilanjutkan dengan sesi praktek tanya jawab kuesioner. Dalam sesi ini calon pendata diminta untuk berpasangan. Satu orang menjadi pewawancara dengan menggunakan kuesioner yang akan digunakan untuk pendataan, dan satu orang lainnya menjadi responden atau keluarga yang sedang didata. Setelah itu mereka bertukar peran. Sesi ini cukup penting karena peserta dapat langsung berlatih tentang cara bertanya, apa maksud masing-masing pertanyaan dikaitkan dengan keluarga mereka, dan bagaimana cara mengisi kuesioner. Dalam sesi ini, banyak pertanyaan yang disampaikan calon pendata, baik yang berkaitan dengan kuesioner maupun tentang kemungkinan kasus-kasus keluarga yang akan muncul.

Dalam sesi pembagian wilayah dan beban kerja, semua peserta yang hadir, baik dari unsur BKKBN, staf desa, maupun calon pendata, aktif memberikan masukan. Pembagian wilayah kerja umumnya didasarkan pada tempat tinggal calon pendata agar efisien dalam hal waktu, tenaga, dan biaya operasional, serta memudahkan penggalian informasi karena masyarakat akan lebih terbuka kepada orang yang sudah dikenal dengan baik. Selain itu, pendata pun telah mengetahui informasi umum tentang keluarga yang akan didata sehingga lebih menjamin akurasi data.

Satuan wilayah yang digunakan dalam pembagian wilayah kerja adalah RT (Rukun Tetangga). Seorang pendata bertanggung jawab terhadap satu RT. Namun hal ini tidak berlaku untuk semua RT karena jumlah pendata tidak selalu sama dengan jumlah RT. Ada satu RT yang didata dua orang pendata, dan ada juga pendata yang harus mendata di lebih dari satu RT. Secara keseluruhan, rata-rata wilayah kerja satu orang pendata adalah 1,1 RT dan setiap pendata rata-rata mewawancarai 82 keluarga (lihat Tabel 1).

questionnaire was discussed in-depth one by one until the enumerators understood the meaning of each of these questions. This session also standardized the perceptions regarding each question in the questionnaire. Participants were also trained to explain the objectives of the data collection to families who were to be respondents and the technique for interviewing them.

After this instructional session was completed, the training continued with a practice session for the questionnaire's questions and answers. In this session, the trainee enumerators were asked to pair off. One person acted as the interviewer by using the questionnaire that was to be used in the data collection, and the other person became the respondent or family from whom the data was to be collected. Afterwards, they switched roles. This session was quite important because the participants could directly practice the interviewing method, what was meant by each question associated with the family and how to fill in the questionnaire. In this session, many questions were raised by the trainees, both those associated with the questionnaire as well as with the family cases that they might encounter in the field.

In the session on the distribution of regions and workload, all participants who attended, from the BKKBN, village staff, and trainee enumerators actively provided input. The distribution of areas was, in general, based on where the trainee lived so it made efficient use of time, labor, and operational costs, as well as making it easy to elicit information because the community would be more open with someone they knew well. In addition, the enumerator already knew some general information on the family to be assessed, so data accuracy can be even more assured.

The area unit used in the distribution of working areas was the RT (Rukun Tetangga: sub-neighborhood unit). One enumerator was therefore responsible for one RT. This arrangement could not, however, be conducted in all RTs because the number of enumerators was not always the same as the number of RT. There was one RT that was covered by two enumerators, and there were also enumerators who had to collect data in more than one RT. Overall, one enumerator covered an average of 1.1 RTs and each enumerator interviewed an average of 82 families (see Table 1).

**Tabel 1. Wilayah Kerja Pendata di Empat Desa Uji Coba SPKM/
Table 1. Enumerators' Working Area in Four CBMS Pilot Villages**

Desa/ Village	Jumlah Pendata/ Number of Enumerators	Jumlah RW/ Number of RW	Jumlah Pendata per RW/Number of Enumerators per RW	Jumlah RT/ Number of RT		Jumlah Keluarga/ Number of Families	
				Total	Per Pendata/ Per Enumerator	Total	Per Pendata/ Per Enumerator
1. Desa Cibulakan	16	6	2.7	22	1.4	1,428	89
2. Desa Parakantugu	13	8	1.6	19	1.5	1,295	100
3. Desa Kedondong	21	4	5.3	20	1.0	1,386	66
4. Desa Jungpasir	17	5	3.4	11	0.6	1,272	75
Average	16.75		3.2		1.1		82

Proses Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data atau wawancara keluarga dilakukan segera setelah selesai pelatihan. Masing-masing pendata dibekali sejumlah kuesioner untuk mendata seluruh keluarga di setiap desa uji coba.

Pendataan dilakukan dari rumah ke rumah, dimulai dari keluarga pendata dan tetangga terdekatnya. Dengan demikian, jika ada kesalahan pengisian atau ada isian yang terlewat bisa lebih mudah untuk ditanyakan kembali. Rumah responden yang sudah didata, ditemplei nomor urut keluarga sesuai dengan nomor urut kuesioner.

Selama dua hari pertama kegiatan pendataan, Tim SMERU melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap hasil kerja para pendata. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi bimbingan secara langsung dan sekaligus mengoreksi isian kuesioner agar kemampuan pendata menjadi lebih baik.

Bimbingan langsung dilakukan di rumah pendata, secara individu atau berkelompok. Masing-masing pendata didatangi dua sampai empat kali, tergantung dari kemampuan individu dalam mengisi kuesioner secara tepat. Setiap kunjungan memakan waktu antara satu hingga tiga jam, tergantung dari jumlah anggota kelompok dan perkembangan kemampuan pendata. Biasanya, kunjungan awal memakan waktu lebih lama dibanding kunjungan berikutnya.

Beberapa kesalahan pendata yang ditemui selama proses bimbingan lapangan adalah: tidak mengisi semua pertanyaan yang tersedia, salah mengisi, atau tidak konsisten dalam mengisi pertanyaan yang saling berhubungan. Di samping itu, ditemui juga pendata yang mengisi kuesioner tanpa melakukan wawancara secara langsung karena mempunyai data dasar dan merasa mengetahui kondisi keluarga yang akan didata. Kesalahan tersebut diperbaiki dengan memberi penjelasan cara pengisian dan memberi pemahaman terhadap pentingnya hasil pendataan dan pentingnya dilakukan pendataan secara langsung kepada keluarga. Untuk mencegah masih adanya pendata yang mengisi kuesioner tanpa melakukan wawancara, tim SMERU meminta kepala desa untuk menghimbau para pendata agar melakukan pendataan langsung ke setiap keluarga.

Setelah bimbingan lapangan selesai, pendata melanjutkan kegiatan pendataan terhadap seluruh keluarga yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Meskipun sudah dilakukan pelatihan dan bimbingan lapangan, masih ditemui beberapa kesalahan dalam mengisi kuesioner, walaupun tidak separah kesalahan saat pendataan awal atau bimbingan lapangan. Kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya ketelitian pendata saat mengisi kuesioner. Sebagian besar kesalahan tersebut dapat ditanggulangi saat pembersihan data, dengan mengacu pada jawaban lain yang berhubungan atau dengan menanyakan langsung melalui telepon kepada pendata atau penduduk setempat yang mengetahui kondisi keluarga yang didata. Secara total, kegiatan pendataan di setiap desa memakan waktu sekitar 10-14 hari.



Data Collection Process

Data gathering or interviews were undertaken immediately after the training was completed. Each enumerator was given a number of questionnaires with which to collect the data on all the families in each pilot village.

The data collection was conducted door-to-door, starting with the enumerator's own family and the nearest neighbors. This way, if there were errors in the completion or something was missed, it would be easier to get back to the respondents. The house of each respondent that had been enumerated had a sequential number attached that matched the number in the questionnaire.

During the first two days of the data collection exercise, the SMERU Team monitored and checked the results of the enumerator's work. This was to provide direct guidance and, at the same time, correct the completion of the questionnaire to improve the capability of the enumerators.

The guidance was given at the enumerator's house, individually or in a group. Each enumerator was approached between two and four times, depending on the capability of the individual in completing the questionnaire accurately. Each visit took between one to three hours, depending on the number of group members and the development of the enumerator's capability. Usually the initial visit took longer than the follow-up visit.

Several errors by the enumerators that were discovered during the field guidance process were: not completing all the questions, incorrect completion, or inconsistency in filling in related questions. In addition, a few enumerators were also found to be filling in questionnaires without conducting direct interviews because they had basic data and felt that they knew the condition of the family whose data would be collected. These errors were reduced by explaining how to fill in the questionnaire and ensuring they understood the importance of the data collection output and of conducting the interview directly with the family. To prevent the enumerators from continuing to fill in questionnaires without conducting interviews, the SMERU Team asked the village head to appeal to all the enumerators to conduct the data collection directly with each family.

After the field guidance was completed, the enumerators continued the data collection activity on all families that were their responsibilities. Despite the training and guidance that was provided in the field, there were still several errors in the completion of the questionnaire, although they were not as serious as the mistakes made during the initial data collection or field guidance. These mistakes occurred because of the carelessness of the enumerator in completing the questionnaire. Most of these mistakes could be rectified during the data cleaning, by referring to other related answers or by telephoning and questioning the enumerator or local resident who was familiar with the condition of the relevant family. In total, the data collection in each village took around 10-14 days.

Sebagai kompensasi terhadap curahan waktu dan tenaga mereka yang terlibat dalam proses pendataan, SMERU menyediakan insentif bagi tenaga pendata serta aparat tingkat kabupaten hingga desa. Besarnya insentif ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dengan aparat BKKBN setempat supaya tidak merusak mekanisme pelaksanaan pendataan yang selama ini diterapkan, namun tetap mempertimbangkan aspek kelayakan. Pendata disediakan insentif Rp2.000 per kuesioner. Kuesioner terdiri dari 86 pertanyaan dan waktu wawancara berlangsung sekitar 15 menit. Sedangkan aparat yang terlibat dalam mengorganisasi pelaksanaan pendataan mendapat insentif antara Rp50.000 – Rp200.000, tergantung pada peran dan tanggung jawabnya. Secara total, biaya yang dikeluarkan untuk pendata dan aparat mulai dari pelatihan, rekrutmen pendata, hingga pelaksanaan pendataan sebesar Rp3.000 per kuesioner.

Pelajaran yang Dapat Dipetik

Berdasarkan pengamatan terhadap seluruh kegiatan pendataan mulai dari seleksi, pelatihan pendata, hingga proses pengumpulan data, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik berkaitan dengan proses pendataan yang melibatkan penduduk setempat, yaitu:

- Pelibatan masyarakat setempat sebagai pendata mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan. Kelebihannya, mereka lebih mengenal dan dikenal masyarakat di lingkungannya sehingga lebih mudah menemui dan mewawancarai keluarga yang akan didata. Kekurangannya adalah adanya indikasi bahwa sebagian pendata mengisi sendiri kuesioner tanpa melakukan wawancara langsung karena merasa cukup mengetahui kondisi keluarga yang akan didata.
- Meskipun tingkat pendidikan cukup memengaruhi kecepatan pendata dalam memahami materi yang disampaikan, namun dalam pelaksanaan pendataan, bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi ketepatan atau validitas data. Demikian pula dengan latar belakang dan pengalaman pendata, bukan merupakan jaminan diperolehnya hasil yang baik. Faktor tanggung jawab, ketelitian, dan ketekunan pendata untuk menyimak kembali isian kuesioner ternyata cukup berpengaruh terhadap hasil.
- Kegiatan pelatihan dan bimbingan langsung saat pendataan awal merupakan tahapan yang penting dilaksanakan dalam rangka mendapatkan hasil pendataan yang maksimal. Saat pelatihan, kemampuan pendata belum dapat diketahui karena semua nampaknya dapat memahami materi yang diberikan. Namun saat bimbingan lapangan, kelemahan pendata mulai terlihat melalui pengamatan isian kuesioner masing-masing.

Rumah responden yang sudah didata, ditemplei nomor urut keluarga sesuai dengan nomor identifikasi kuesioner.

The house of each respondent enumerated had a sequential number attached that matched the identification number in the questionnaire.

As compensation for their time and labor in the data collection process, SMERU provided an incentive for the enumerators and authorities at the kabupaten to village level. The size of the incentive was based on the results of the discussion with the local BKKBN authorities so that it did not upset the data collection mechanism that had previously been applied, while taking the principle of fairness into account. The enumerators were provided with a payment of Rp2,000 per questionnaire. The questionnaire consisted of 86 questions and interviews usually took about 15 minutes. The authorities who were involved in organizing the data collection received payments between Rp50,000 – Rp200,000, depending on their role and responsibilities. In total, the cost expended for the enumerators and authorities starting from training, recruitment of the enumerators through to implementation of the data collection was Rp3,000 per questionnaire.

Lessons Learned

Based on observations of the whole data collection activity starting from the selection and training of enumerators to the process of data gathering, there are several lessons learned in connection to data gathering that involves the local community, namely:

- *The involvement of local communities as enumerators has its advantages and disadvantages. One advantage is that they are more familiar with and to the community in their area, so it is easier to meet and interview the families to be enumerated. On the other hand, the disadvantage is the indication that some enumerators filled in the questionnaire themselves without conducting an interview because they felt sufficiently knowledgeable on the condition of the relevant family.*
- *Although the level of education influenced how fast the enumerators understood the material provided, in the implementation of the data collection it was not the main factor that influenced the accuracy or validity of the data. The same applies to the background and experience of the enumerators as it was no guarantee of obtaining a good outcome. The degree to which the enumerators were responsible, careful, and thorough when re-scrutinizing the completed questionnaires appears to have affected the outcome.*
- *The training and direct guidance activities in the initial data collection was an important phase to undertake in order to obtain the maximum result from the data collection. During the training, the capability of the enumerators were not yet known because all appeared to understand the material they were provided. During the field guidance, however, the weakness of the enumerators was revealed by examining each completed questionnaire.*



Dok. SMERU/SMERU Doc.

Di luar aspek pendata, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pendataan, yaitu:

- Konsep unit terkecil yang akan digunakan, apakah unit keluarga seperti yang digunakan dalam uji coba ini atau unit rumah tangga, harus didefinisikan secara rinci supaya dapat menghindari kemungkinan penghitungan ganda atau sebaliknya, ada individu yang tidak terdata. Contoh kasus yang perlu didefinisikan antara lain: keluarga yang menetap sementara di desa lain dalam rangka berusaha, saudara yang tinggal di suatu keluarga, dan laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri.
- Penggunaan nomor identifikasi keluarga yang sudah didata dan ditempel di depan rumah merupakan hal yang cukup penting. Selain membantu pendata dalam menandai keluarga yang sudah diwawancarai, juga menjadi bukti bahwa pendata melakukan wawancara langsung terhadap keluarga yang bersangkutan. ■ **Hastuti dan Nina Toyamah**

Apart from the issues related to the enumerators, other matters requiring attention when collecting data are:

- *The concept of the smallest unit that will be used, whether it was the family unit such as used in this pilot project, or the household unit, has to be defined in detail. This is to avoid the possibility of double counting or of individuals not being assessed. Examples of cases that need to be defined include: families residing temporarily in other villages because of business, relatives living in with a family, and men who have more than one wife.*
- *The use of sequential numbering of families who have already been interviewed and the attachment of the identification number to the front of the house is something quite important. Apart from assisting the enumerator in denoting the families already interviewed, it also proves that the enumerator has conducted a face-to-face interview with the family.* ■ **Hastuti and Nina Toyamah**

Boks 1. Karakteristik Pendata SPKM/Box 1. Characteristics of CBMS Enumerators

Secara keseluruhan, jumlah pendata yang ikut melaksanakan uji coba SPKM adalah 67 orang (lihat Tabel 2). Jumlah pendata di dua desa di Kabupaten Demak (Desa Kedondong 21 orang, dan Desa Jungpasir 17 orang) lebih banyak dibandingkan dengan di dua desa lainnya di Kabupaten Cianjur (Desa Cibulakan 16 orang, Desa Parakantugu 13 orang). Jumlah pendata di masing-masing desa uji coba tidak didasarkan pada jumlah keluarga yang akan didata, tetapi lebih tergantung pada pendata yang dianggap memiliki kemampuan dan kesanggupan melakukan pendataan.

Pekerjaan kebanyakan pendata adalah ibu rumah tangga (termasuk kader BKKBN). Oleh karena itu, sebagian besar pendata (63%) adalah perempuan. Pendidikan sebagian besar pendata adalah lulusan SLTP dan SLTA. Di dua desa uji coba di Kabupaten Cianjur, tingkat pendidikan pendata yang hanya lulus SD lebih banyak dibandingkan di dua desa uji coba di Kabupaten Demak. Hal ini berkaitan dengan tingkat rata-rata pendidikan penduduk desa uji coba di Kabupaten Cianjur yang memang pada umumnya lebih rendah daripada di Kabupaten Demak. Namun demikian, pendata di Kabupaten Cianjur umumnya adalah kader dan aparat desa yang berpengalaman dalam pendataan. Usia pendata di keempat desa SPKM rata-rata di bawah 40 tahun dengan rentang usia antara 17 hingga 60 tahun.

Dari empat desa uji coba, hanya Desa Cibulakan di Kabupaten Cianjur yang masih memiliki kader desa yang aktif melakukan pendataan untuk keperluan BKKBN. Di desa ini terdapat 11 kader, 10 orang di antaranya terlibat dalam pendataan SPKM. Semua kader adalah ibu rumah tangga yang cukup aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, khususnya pengajian, arisan, PKK,

Overall, there were a total of 67 enumerators involved in the implementation of the CBMS pilot project (see Table 2). The number of enumerators in the two villages in Kabupaten Demak (21 people in Desa Kedondong and 17 in Desa Jungpasir) was more than in the two other villages in Kabupaten Cianjur (16 people in Desa Cibulakan and 13 in Desa Parakantugu). The number of enumerators in each pilot village was not based on the number of families to be interviewed but depended more on the availability of enumerators who were considered to have the ability and willingness to undertake the work.

The occupational background of the enumerators was mostly housewives (including BKKBN cadres). Therefore, most enumerators were women (63%). In terms of their educational background, most enumerators are junior and senior high school graduates. In the two pilot villages in Kabupaten Cianjur, there were more enumerators who only had an elementary school education compared to the two pilot villages in Kabupaten Demak. This was related to the level of education of the people in the pilot villages in Kabupaten Cianjur that was in general lower than those in Kabupaten Demak. Nevertheless, the enumerators in Kabupaten Cianjur were, in general, cadres and village authorities who were already experienced in data collection. The age of the enumerators in the four CBMS villages averaged below 40 years within an age group of 17 to 60 years.

Of the four pilot villages, only Desa Cibulakan in Kabupaten Cianjur still has village cadres actively conducting data collections for BKKBN. In this village there were 11 cadres, ten of whom were involved in the CBMS data collection. All cadres were housewives who were quite active in community affairs, especially pengajian (Koran study groups), arisan (rotating savings groups), Family Welfare Program (PKK), and the management of government program funds

dan pengelolaan dana program pemerintah seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Sementara itu, di Desa Parakantugu, Kabupaten Cianjur dan Desa Kedondong, Kabupaten Demak hanya terdapat seorang kader.

Di seluruh desa uji coba, aparat desa terlibat sebagai pendata. Pada umumnya aparat desa pernah melaksanakan kegiatan pendataan meskipun tidak serutin kader. Banyaknya aparat desa yang terlibat dalam pendataan turut mengindikasikan terbatasnya masyarakat yang dinilai mampu melakukan pendataan. Di Desa Jungpasir yang tidak memiliki kader misalnya, selain melibatkan staf desa, SPKM juga melibatkan beberapa guru SD/TK setempat, bidan desa, dan masyarakat umum yang biasanya memiliki hubungan keluarga dengan staf desa. Di Desa Kedondong sebagian besar pendata adalah ibu rumah tangga, tetapi sebagian desa juga melibatkan beberapa remaja yang baru tamat/lulus SMP atau SMA.

■ Hastuti dan Nina Toyamah

such as the Kecamatan Development Program (PPK). Meanwhile, in Desa Parakantugu, Kabupaten Cianjur and Desa Kedondong, Kabupaten Demak, there was only one cadre.

In all pilot villages, village authorities were involved as enumerators. In general, village authorities have been involved in data collection activities although not as routinely as cadres. The involvement of village authorities in the data collection indicated the limited number of community members who were deemed capable of undertaking the data collection. In Desa Jungpasir which does not have a cadre, for example, apart from involving the village staff, the data collection also involved several local elementary school/kindergarten teachers, midwives, and the general community who usually have a family relationship with the village staff. In Desa Kedondong, most enumerators were housewives but in some villages there was also involvement from several teenagers who had just graduated from junior or senior high schools.

■ Hastuti and Nina Toyamah

**Tabel 2. Jumlah dan Karakteristik Pendata di Empat Desa Uji Coba SPKM/
Table 2. Number and Characteristics of the Enumerators in Four CBMS Pilot Villages**

Pendidikan/Education		
Jenjang/ Level	Jumlah Pendata/Number of Enumerators	
	n	%
D2/ D2 Diploma Program	3	4
SLTA/ Senior High School	24	36
SLTP/ Junior High School	26	39
SD/ Elementary School	14	21
Pekerjaan/Occupation		
Jenis/Type	Jumlah Pendata/Number of Enumerators	
	n	%
Aparat desa/ Village Authorities	23	34
Kader/ Cadres	12	18
Ibu rumah tangga/ Housewives	22	33
Guru/ Teachers	4	6
Bidan/Midwives	1	1
Menganggur (baru menyelesaikan sekolah)/ Unemployed (just completed school)	5	7
Umur/Age		
Kelompok Umur/Age Group	Jumlah Pendata/Number of Enumerators	
	n	%
<30	25	37
30-40	21	31
>40	21	31
Jenis Kelamin/Sex		
Kelompok/Group	Jumlah Pendata/Number of Enumerators	
	n	%
Perempuan/Female	42	63
Laki-laki/Male	25	37

Boks 2. Mengapa Pendataan Harus Dilakukan Berulang Kali? Box 2. Why Should Data Collection be Undertaken A Number of Times?

Mengapa harus berkali-kali dilakukan pendataan? Pertanyaan ini sering disampaikan oleh banyak pihak di tingkat desa, baik oleh kepala desa dan aparatnya, para pendata, maupun warga desa karena dalam satu tahun mereka bisa beberapa kali melakukan pendataan untuk kepentingan berbagai lembaga. Sebagai contoh, di satu desa uji coba di Kabupaten Cianjur, selama periode November 2004 hingga April 2005 telah dilakukan empat kali pendataan yang berbeda, yaitu: pendataan keluarga sejahtera untuk BKKBN, pendataan keluarga miskin (gakin) untuk Dinas Kesehatan, pendataan posyandu (antara lain mendata pasangan usia subur dan anak usia balita) untuk Dinas Kesehatan, dan terakhir pendataan keluarga melalui SPKM untuk SMERU. Di samping itu, beberapa bulan sebelumnya mereka melakukan pendataan penduduk dewasa untuk kepentingan Pemilu. Bahkan beberapa bulan setelah pendataan SPKM, mereka pun disibukkan dengan pendataan penduduk untuk kepentingan pemilihan langsung kepala daerah, pendataan keluarga miskin untuk program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang dikoordinasikan oleh BPS, dan pendataan penduduk jompo untuk sebuah yayasan.

Masing-masing pendataan tersebut tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik yang dikeluarkan secara langsung maupun yang tidak langsung untuk operasional pelaksanaan. Bahkan lebih dari itu, pelaksanaan pendataan pun menyita waktu dan tenaga para pendata yang tidak selalu dihargai dengan insentif memadai serta mengganggu masyarakat yang didata.

Lantas, mungkinkah diciptakan sistem pendataan yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga masyarakat tidak terus disibukkan oleh kegiatan pendataan? Jika sistem pendataan terpadu dapat tercipta, diharapkan tenaga, waktu, dan dana yang tersedia dapat dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat.

Untuk itu, dibutuhkan suatu upaya bersama yang dapat mensinergikan berbagai kepentingan lembaga atau sektor dalam suatu sistem pendataan yang komprehensif. Di samping itu, perlu juga dibangun kesadaran berbagai pihak untuk tidak selalu mengedepankan ego sektoral.

SPKM diujicobakan sebagai alternatif dalam upaya tersebut. Dilihat dari jenis pertanyaan yang tersedia, kuesioner uji coba SPKM telah mempertimbangkan berbagai aspek atau bersifat multidimensional sehingga dapat memenuhi kebutuhan banyak lembaga. Dalam kuesioner tersebut terdapat seperangkat indikator yang terkait dengan pekerjaan, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, konsumsi, kesehatan, dan sanitasi keluarga. Namun demikian, agar dapat lebih mengakomodasi berbagai kepentingan, kuesioner tersebut perlu terus disempurnakan.

■ **Hastuti dan Nina Toyamah**

Why is data collection repeatedly undertaken? This question was often raised by many at the village level, including the village head and his officials, the enumerators, as well as the villagers because in one year they could be subjected to several data collection activities by various institutions. As an example, in one pilot village in Kabupaten Cianjur during the period from November 2004 to April 2005 there were four different data collection activities, namely: prosperous families for BKKBN, poor families (gakin) for the district health office, posyandu (integrated health posts) data on couples of reproductive age and children under five years of age for the district health office, and lastly the CBMS family data collection for SMERU. In addition, several months earlier they collected data on the adult population for the general election. Several months after the CBMS data collection, they were also busy collecting data on residents for the direct elections of the regional heads of government, on poor families for the Direct Cash Transfer (SLT) program that was coordinated by BPS, and on the elderly population for a private foundation.

Each of these data collection activities definitely needed a significant amount of funds, both to spend directly on the operational costs of implementation as well as on indirect costs. More than that, data collection also took up the time and effort of the enumerators that was not always rewarded with adequate remuneration. The data collection also disrupted the routine of the community being assessed.

Is there a possibility of creating a data collection system that can accommodate a variety of interests so the community is not constantly occupied by data collection activities? If an integrated data collection system could be created, it is expected that labor, time, and available funds could be diverted into other more beneficial activities.

For that purpose, there needs to be one collective effort that can synergize a number of institutional or sectoral interests in one comprehensive data collection system. In addition, there also needs to be awareness-raising for the various stakeholders to put aside their own institutional interests.

CBMS was pilot tested as an alternative in this effort. In terms of the variety of questions, the CBMS pilot questionnaire considered various aspects or was multidimensional in order to fulfill the need of many institutions. In this questionnaire, there is a set of indicators associated with employment, education, socio-economic conditions, consumption, health, and family sanitation. Nevertheless, in order to be more accommodating of a variety of interests, this questionnaire certainly needs to be further refined. ■ **Hastuti and Nina Toyamah**

SISTEM PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN OLEH MASYARAKAT: SEBUAH PERSPEKTIF

THE COMMUNITY-BASED MONITORING SYSTEM: A PERSPECTIVE

Celia Reyes*



Dok. Tim CBMS-Filipina/CBMS-Philippines Team Doc.

Latar Belakang

Berkembangnya sistem pemantauan kesejahteraan oleh masyarakat (SPKM) bermula dari semakin meningkatnya tuntutan akan sumber informasi terbaru dan berkala yang terpilah hingga tingkat komunitas. Secara khusus, sistem ini dirancang untuk menyediakan data yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan dan pemantauan di semua tingkat pemerintahan. Hal ini dipandang penting terutama terkait dengan upaya desentralisasi berbagai fungsi pemerintahan yang terus-menerus dilakukan di banyak negara, termasuk dalam penyediaan layanan sosial.

SPKM juga diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pemantauan kemiskinan. Data yang dikumpulkan melalui sistem ini akan dimanfaatkan untuk memfasilitasi penilaian kebijakan dan program pemerintah. Selain itu, SPKM bertujuan untuk membantu pemerintah lokal dalam pengidentifikasian kebutuhan, pembuatan kebijakan, dan pelaksanaan program.

* Celia Reyes adalah Direktur Proyek Dampak Mikro Kebijakan Penyesuaian Makroekonomi (MIMAP) di Filipina dan *Senior Research Fellow* pada Institut Filipina untuk Studi Pembangunan (PIDS).

Background

The development of a community-based monitoring system (CBMS) stems from the growing demand for a regular source of up-to-date information that is disaggregated at the community level. In particular, the system is intended to address data requirements for development planning and monitoring at all levels of governance. This is deemed important especially with on-going efforts in many countries to decentralize various government functions including the provision of social services.

CBMS is also intended to play a crucial role in poverty monitoring. The data to be collected through the system will be utilized to facilitate assessment of policies and programs. Moreover, the CBMS aims to assist local governments in needs-identification, policymaking, and program implementation.

* Celia Reyes is Director of the Micro Impacts of Macroeconomic Adjustment Policies (MIMAP) project in the Philippines and *Senior Research Fellow* at the Philippine Institute for Development Studies (PIDS).

Sejak awal 1990-an, Pusat Penelitian Pembangunan Internasional (IDRC) di Canada melalui Proyek Dampak Mikro Kebijakan Penyesuaian Makroekonomi (MIMAP) telah membantu merancang dan melakukan uji coba pemantauan berbasis masyarakat dan sistem pengembangan lokal di beberapa negara di Asia dan Afrika. Melalui mekanisme ini, di mana masyarakat setempat dapat memantau keadaan mereka melalui seperangkat indikator yang dirancang secara rinci namun cukup sederhana, pemerintah lokal dapat menggali berbagai informasi untuk pengambilan keputusan di tingkat lokal, serta mengirimkannya ke pemerintah kabupaten dan provinsi untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran. Tujuan utamanya adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Namun selain itu, terdapat berbagai manfaat terkait lainnya, yakni pengembangan kapasitas pemerintah lokal, peningkatan keadilan gender, mendorong pengambilan keputusan yang berdasarkan pada bukti-bukti, dan peringatan dini terhadap krisis yang mungkin akan terjadi.

SPKM adalah metode sistematis untuk pengumpulan data rumah tangga di tingkat lokal, Namun SPKM lebih dari sekadar sistem pengumpulan data. Sistem ini memadukan penggunaan data pada perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat lokal. Sistem ini juga dirancang untuk mendukung proses desentralisasi dengan menyediakan suatu sistem perbaikan tata kelola pemerintahan bagi pemerintah daerah.

Pengalaman SPKM di Berbagai Negara

Berawal dari negara kelahirannya di Filipina, SPKM saat ini sudah dikembangkan di Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Kamboja, Ghana, Indonesia, Lao PDR, Nepal, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, dan Vietnam. Keadaan perkembangan di masing-masing negara ini berbeda-beda. Di Filipina, SPKM telah dilaksanakan secara nasional, sementara di Kamboja sedang dalam proses pelebagaan. Di Ghana, Indonesia, dan Benin, pelaksanaannya baru pada tahap uji coba, sedangkan di Bangladesh, Burkina Faso, Lao PDR, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Vietnam, cakupan SPKM terus diperluas.

Since the early 1990s, the International Development Research Centre (IDRC)-Canada through the Micro Impacts of Macroeconomic Adjustment Policies (MIMAP)-Project has supported the design and piloting of the community-based monitoring and local development systems in selected countries in Asia and Africa. These mechanisms, in which communities monitor their situation by carefully designed but relatively simple sets of indicators, allow local governments to use that information in local decisions, and feed it to the district and provincial levels for budget and related decision-making. The main intent is poverty reduction. In addition, other important associated benefits are capacity-building of local governments, increasing gender equity, promotion of evidence-based decision-making, and early warning signs of impending crises.

CBMS is an organized way of collecting household level information at the local level. However, CBMS is more than just a data collection system. It seeks to integrate the use of data in local level planning and program implementation. It is also intended to support the decentralization process by providing local governments with a system to improve local governance.

CBMS experiences

From its birthplace in the Philippines, the CBMS is now being implemented in Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Cambodia, Ghana, Indonesia, Lao PDR, Nepal, Pakistan, Senegal, Sri Lanka, and Vietnam. The status of implementation in these countries varies accordingly. In the Philippines, it has been implemented nationally, while in Cambodia it is heading towards institutionalization. In Ghana, Indonesia, and Benin, the implementation is still in the pilot stage, while in Bangladesh, Burkina Faso, Lao PDR, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, and Vietnam, its coverage is being expanded.

Berbagai proyek uji coba sedang dilaksanakan untuk mengembangkan SPKM yang dapat memfasilitasi inisiatif anggaran responsif gender di tingkat lokal.

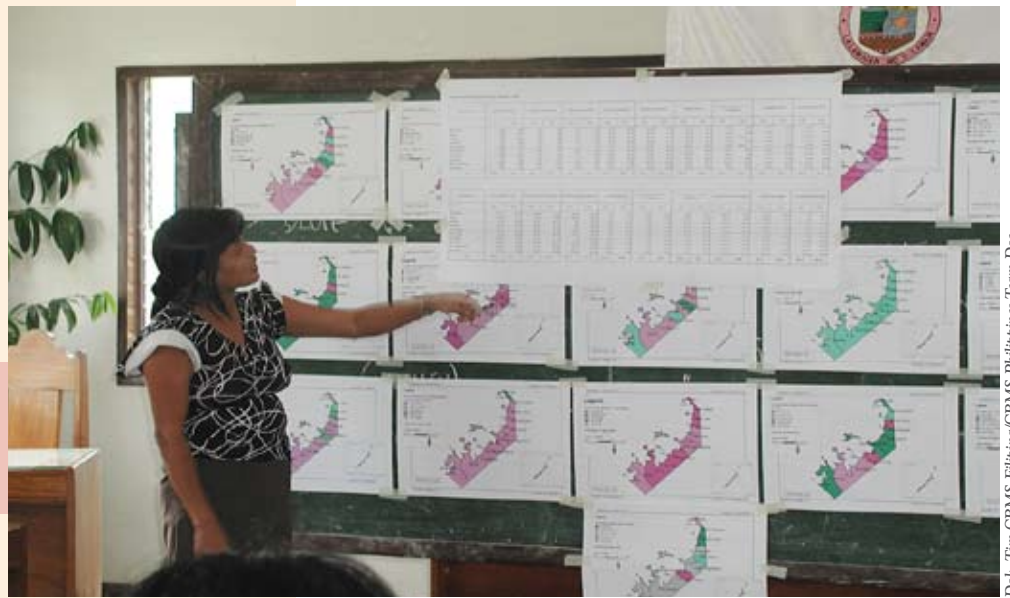
Pilot projects are underway to develop a CBMS that would facilitate gender responsive budgeting initiatives at the local level.



Dok. Tim CBMS-Filipina/CBMS-Philippines Team Doc.

Di Filipina, SPKM telah dilaksanakan secara nasional.

In the Philippines, CBMS has been implemented nationally.



Dok. Tim CBMS-Filipina/CBMS-Philippines Team Doc.

Mengingat keunikan dan keanekaragaman budaya di negara-negara tersebut, maka tidak mengherankan jika masing-masing negara menerapkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan SPKM. Sebagai contoh, di Burkina Faso, informasi mengenai SPKM disebarluaskan melalui gambar ke masyarakat yang masih tinggi tingkat buta hurufnya. Di Nepal, metode kelompok diskusi terarah digunakan untuk mengumpulkan data.

Walaupun menggunakan pendekatan yang berbeda, pengalaman SPKM di negara-negara tersebut sangat positif. Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat lokal SPKM dapat menyediakan informasi yang sangat diperlukan bagi perencanaan, pemantauan, dan penilaian keadaan kemiskinan, pengembangan profil kemiskinan, dan penerapan upaya penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, di Filipina, data SPKM telah digunakan oleh mitra-mitra lokal, antara lain untuk mengidentifikasi penerima yang berhak atas program penanggulangan kemiskinan dan memfasilitasi alokasi sumber daya. Di Vietnam, data SPKM digunakan untuk memeriksa identifikasi rumah tangga miskin yang dilakukan pemerintah. Di Burkina Faso dan Nepal, data digunakan untuk menentukan profil kemiskinan individu, rumah tangga, dan komunitas. Di Lao PDR, informasi digunakan sebagai masukan bagi penyusunan “buku desa”, sementara di Senegal, data digunakan sebagai informasi tambahan bagi dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK).

Inisiatif Baru: SPKM-Anggaran Responsif Gender

Berbagai proyek uji coba sedang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan SPKM untuk memfasilitasi inisiatif anggaran responsif gender di tingkat lokal. Inisiatif ini bermula dari adanya kemungkinan memanfaatkan SPKM untuk secara efektif mengintegrasikan dan memfasilitasi penyusunan anggaran yang responsif gender, di samping penyusunan anggaran yang konvensional.

Given the unique and varied culture of these countries, it is not surprising that they also have different approaches in implementing CBMS. For instance, in Burkina Faso, drawings are used to disseminate the information at the community wherein literacy is a problem. In Nepal, focus group discussions are being used to collect data.

Notwithstanding different approaches, the CBMS experiences in these countries have been very positive. It has shown that it can indeed provide the much needed information at the local level for planning, monitoring, and assessment of the poverty situation, developing poverty profiles, and implementation of poverty reduction policies and measures. For instance, in the Philippines, the CBMS data have been used by local partners to identify eligible beneficiaries of poverty reduction programs and facilitate resource allocation, among others. In Vietnam, the CBMS data are used to check the identification of poor households by the government. In Burkina Faso and Nepal, data were used to establish poverty profiles of individuals, households, and communities. In Lao PDR, the information is used as input in the preparation of the “village book”, while in Senegal, they were used as complementary information for the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP).

New initiative: CBMS-Gender Responsive Budgeting

Pilot projects are underway to develop a CBMS that would facilitate gender responsive budgeting (GRB) initiatives at the local level. This initiative stems from the prospect of making use of the CBMS to effectively incorporate and facilitate gender responsive budgeting as well as mainstream budgeting.



Anggaran responsif gender merupakan inisiatif yang mengintegrasikan perspektif gender dalam upaya menelusuri bagaimana sebuah anggaran tanggap terhadap kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan menganalisis anggaran pemerintah dalam hal dampaknya, baik terhadap perempuan dan laki-laki maupun anak laki-laki dan perempuan. Inisiatif ini tidak hanya menitikberatkan pada alokasi dan tindakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga pada sistem penyusunan anggaran pemerintah, proses penganggarannya, dan peran berbagai pelaku dalam penganggaran.

Salah satu unsur kunci efektivitas anggaran yang responsif gender adalah tersedianya data yang relevan dan terpilah untuk menelusuri kemajuan setiap prakarsa pembangunan, pencapaian penerimanya, dan menjamin rencana pembangunan dan anggaran yang tanggap terhadap aneka kebutuhan nyata kaum laki-laki dan perempuan di segala usia. SPKM telah diidentifikasi sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Kesimpulan

Penggunaan nyata data SPKM oleh berbagai institusi pemerintah dan nonpemerintah di berbagai negara di atas membuktikan bahwa SPKM dapat mengisi kesenjangan data di tingkat lokal. Namun, untuk perluasan replikasi dan pelembagaan SPKM, masih banyak upaya advokasi yang perlu digalakkan dan hal ini merupakan tugas negara peserta SPKM di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, telah diakui bahwa metodologi standar SPKM dapat memfasilitasi pelaksanaan anggaran responsif gender karena langsung menghasilkan informasi relevan mengenai gender. Namun demikian, upaya-upaya untuk menjajaki, memperkuat, dan memaksimalkan lebih jauh potensi SPKM ini harus terus didorong dan ditingkatkan. ■

GRB is identified as an initiative that integrates a gender perspective in tracking how budgets respond to the different requirements across genders, and analyzes government budgets in terms of its impact on women and men, boys and girls. This initiative looks not only at the allocations and revenue raising measures of governments but also at their budgeting systems, processes, and the roles of the various actors in budgeting.

One key element for effective gender responsive budgets is the availability of pertinent and disaggregated data to track progress of development initiatives, beneficiary reach, and help ensure development plans and budgets respond to the actual and diverse needs of men and women, across ages. CBMS has been identified as one of the tools that can be adapted for these purposes.

Conclusion

The concrete uses of CBMS data by various government and non-government organizations in the various countries above have shown that CBMS can indeed fill in the data gaps at the local level. For its wider replication and institutionalization, however, more advocacy still needs to be done and this will be the thrust of these CBMS-member countries in the coming years.

Moreover, it has been recognized that the standard CBMS methodology can facilitate GRB as it can readily generate gender-relevant information. Efforts must, however, be exerted to further explore, strengthen, and maximize the system's capabilities. ■



Dok. Tim CBMS-Filipina/CBMS-Philippines Team Doc.

SPKM memadukan penggunaan data pada perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat lokal.
CBMS integrates the use of data in local level planning and program implementation.

PARTISIPASI PKBH-B DALAM PENGUMPULAN DATA DAN PEMANTAUAN PROGRAM KEMISKINAN

THE PARTICIPATION OF PKBH-B IN DATA COLLECTION AND MONITORING OF POVERTY PROGRAMS

Bagus Giripurwo*



Dok. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu/
The Bengkulu Coordination Team for Poverty Reduction. doc

Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBH-B) sebagai lembaga bantuan hukum telah berdiri sejak 1997. Untuk litigasi, PKBH-B khususnya melakukan pembelaan terhadap kasus-kasus hukum yang dinilai menjadi sumber proses pemiskinan struktural, seperti: kasus perampasan tanah, kasus konflik penggusuran, dan kasus-kasus dampak kebijakan/program/proyek pemerintah.¹

Saat ini PKBH-B sudah membangun tiga organisasi rakyat (OR), yaitu Sarekat Tani Bengkulu (STAB), Sarekat Nelayan Bengkulu (SNEB), dan Himpunan Pedagang kecil Mandiri Bengkulu (HPMB). Ketiga OR tersebut diorganisasi dari berbagai komunitas korban proses pemiskinan. Pelaksanaan kegiatan PKBH-B dijalankan oleh lima kantor bantuan hukum yang ada di wilayah kabupaten/kota. Di samping itu, PKBH-B juga membangun aliansi dengan perguruan tinggi lokal, baik dengan para dosen maupun secara institusional

Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBH-B) was established as a legal aid institute in 1997. In particular, PKBH-B undertakes the advocacy of legal cases that are assessed as being the source of structural impoverishment, such as cases of land expropriation, conflict over land evictions, and the impact of government projects, programs, and policies.¹

At the present time PKBH-B has established three grass-roots organizations, namely the Bengkulu Farmers' Association (STAB), Bengkulu Fishers' Association (SNEB), and the Bengkulu Independent Small Traders Association (HPMB). These three organizations were organized from different communities that were the victims of the impoverishment process. The management of PKBH-B's activities is carried out by five legal aid offices located at the kabupaten/kota level. In addition, PKBH-B has also built alliances with local higher education

* Bagus Giripurwo adalah anggota Dewan Pakar Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBH-B).

¹ Sebagai contoh, sejak 2001 PKBH-B bersama Sarekat Tani Bengkulu melakukan advokasi terhadap 6000 petani peserta proyek TCSSP Tree Crop yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan proyek tersebut. Proyek yang merupakan proyek Dinas Perkebunan bekerja sama dengan ADB (Asian Development Bank) ini, antara lain memberi bantuan kredit dalam bentuk bibit. Petani menduga ada pemberian bibit palsu.

* Bagus Giripurwo is a member of the Board of Experts of PKBH-B (Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu/Association of Legal Aid Offices of Bengkulu).

¹ As an example, since 2001, PKBH-B, together with the Bengkulu Farmers' Association has advocated for 6,000 farmer participants in the TCSSP Tree Crop project who felt disadvantaged by the implementation of this project. The project that was a cooperative project between the Regional Plantations Office and the ADB (Asian Development Bank) provided, among others, credit assistance in the form of seeds. The farmers believed they had been given substandard quality seeds.

dengan Universitas Bengkulu. Tulisan ini selanjutnya akan memfokuskan pada keterlibatan PKBH-B dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

Partisipasi PKBH-B dalam kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu bertolak dari semangat bahwa program ini merupakan salah satu instrumen yang bisa menjawab penyelesaian kasus-kasus pemiskinan yang sedang dihadapi konstituen anggota OR. PKBH-B melakukan advokasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mendorong multipihak (unsur birokrat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan LSM lokal) untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian masalah yang nyata dihadapi oleh komunitas miskin. Pelibatan multipihak dilakukan pada setiap tahapan operasional, mulai penggalan dan perumusan proses pemiskinan yang dihadapi komunitas miskin, penyusunan kebijakan strategis, penyusunan kriteria dan indikator kemiskinan, pendataan sasaran program, penyusunan program aksi, dan pelibatan komunitas miskin dalam pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Beberapa anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Bengkulu saat melakukan rapat koordinasi.

Some members of the Bengkulu Coordination Team for Poverty Reduction during a coordination meeting.



Dok. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu/
The Bengkulu Coordination Team for Poverty Reduction. doc

Atas dasar itu, PKBH-B telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menyamakan paradigma penyebab kemiskinan struktural di antara para pemangku kepentingan dengan menekankan pada hasil penguatan kapabilitas di tingkat komunitas target. Prosesnya selalu dilandasi oleh pendekatan berbasis hak dengan mekanisme pelibatan wajib multipihak yang terkoordinasi dan terintegrasi. Tujuan akhirnya adalah untuk membangun kekuatan partisipasi dan kontrol masyarakat miskin dalam proses perubahan sosial yang multidimensional. Untuk penyusunan program penanggulangan kemiskinan, PKBH-B memfokuskan pada penyelesaian masalah yang menjadi penyebab proses terjadinya kemiskinan. Sedangkan untuk ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan, harus didasari pada kekuatan data personal kondisi orang miskin (akses dan aset). Kemudian strategi kebijakannya harus memastikan adanya perlindungan sosial yang dapat mengurangi dampak negatif guncangan ekonomi makro.

Selama beberapa tahun terakhir ini, PKBH-B banyak terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam konsolidasi KKP (Kajian Kemiskinan Partisipatoris) di tingkat nasional, di samping menjadi anggota Tim Koordinasi KPKD (Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah). KKP dilaksanakan untuk memberi masukan bagi penyusunan dokumen Strategi

institutions, with academic staff as well as with the University of Bengkulu. This article will focus on the involvement of PKBH-B in poverty reduction efforts in the Province of Bengkulu.

The impetus for PKBH-B's participation in poverty reduction programs in Bengkulu arose from the belief that this program is an instrument that can address the cases of impoverishment faced by members of the organizations. PKBH-B advocates poverty reduction policies by supporting multiple stakeholders (bureaucracy, regional parliaments, higher education institutions, and local NGOs) to be directly involved in the process of resolving real problems faced by the poor. Every operational phase involves multiple stakeholders. These include discovering and formulating the process of impoverishment faced by the poor, preparing strategic policies, preparing criteria and indicators of poverty, data collecting on program targets, developing an action program, to involving the poor in implementation, monitoring, and evaluation.

On that basis, PKBH-B has undertaken a series of activities to establish a common ground on views concerning the causes of structural poverty among all stakeholders while stressing capacity building at the level of the target community. The process is grounded in a rights-based approach with the mandatory coordinated and integrated involvement of multiple stakeholders. The eventual aim is to build the strength of participation and the ability of the poor to control the process of multi-dimensional social change. For the preparation of poverty reduction programs, PKBH-B focuses on the resolution of problems that cause poverty. Meanwhile, targeting accuracy of the poverty reduction program has to be based on the validity of personal data on the condition of the poor (access and assets). Then the policy strategy has to ensure there is social protection that can reduce the negative impact of macro-economic shocks.

In addition to being a member of the coordination team of the KPKD,² during the last few years, PKBH-B has often been involved in various poverty reduction activities, especially in the consolidation of PPAs (Participatory Poverty Assessments) at the national level. PPAs have been undertaken to provide input to the preparation of the National Poverty Reduction Strategy (PRSP). PKBH-B socialized

² KPKD: Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Regional Poverty Reduction Committee.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bengkulu mengadakan pertemuan tingkat kecamatan di Kecamatan Enggano.

The Bengkulu Coordination Team for Poverty Reduction held a village level meeting at Kecamatan Enggano.



*Dok. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu/
The Bengkulu Coordination Team for Poverty Reduction. doc*

Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN). PKBH-B melakukan sosialisasi hasil KKP nasional ini kepada Tim KPKD Bengkulu pada April 2004 dengan tujuan untuk memastikan integrasi proses KKP dalam penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah). Pada Juli 2004, penyusunan dokumen SPKD Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil KKP sembilan komunitas miskin berhasil dilaksanakan dengan PKBH-B sebagai salah satu anggota Tim Penyusun Terpadu. Namun demikian, PKBH-B menilai kapasitas analisis pemerintah daerah masih lemah sehingga tidak mampu menerjemahkan hasil analisis KKP ke dalam kebijakan strategis.

the results of the national PPAs to the KPKD Team in Bengkulu in April 2004 with the aim of ensuring the integration of the PPA process into the preparation of the Regional Poverty Reduction Strategy (SPKD). In July 2004, preparation of the SPKD document for Bengkulu, based on the results of the PPA on nine poor communities, was successfully undertaken with PKBH-B as one of the members of the Integrated Implementation Team. Nevertheless, PKBH-B considers the analytical capability of the regional government as weak and unable to translate the results of the PPA analysis into strategic policy.

Boks 1. 13 Kriteria Miskin Menurut Orang Miskin di Bengkulu/ Box 1. 13 Criteria of the Poor According to the Poor in Bengkulu

1. Rata-rata pengeluaran belanja harian keluarga kurang dari Rp.15.000,-
2. Anggota keluarga (anak dan istri) ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga.
3. Tidak memiliki modal sendiri untuk usaha/kerja atau punya modal dari utang paling banyak Rp. 5.000.000,-
4. Mempunyai beban utang untuk biaya makan, berobat, dan sekolah.
5. Tidak memiliki lahan produksi sendiri atau memiliki lahan paling luas 2 hektar dan belum bersertifikat (petani kecil).
6. Tidak memiliki alat tangkap ikan atau hanya memiliki jaring dan sampan saja (nelayan kecil).
7. Tidak memiliki alat dan tempat usaha sendiri atau hanya punya warung kecil (pedagang kecil, buruh jasa, pengrajin kecil).
8. Tidak memiliki jaminan kepastian penghasilan tetap (pemulung, buruh, pedagang kecil).
9. Tidak memiliki rumah sendiri untuk keluarga atau punya rumah kecil dan sederhana.
10. Tidak mampu menyediakan sarana air bersih sendiri.
11. Penerangan rumah hanya menggunakan lampu minyak atau tidak mampu menanggung beban biaya listrik lebih dari Rp. 45.000,- per bulan.
12. Tidak mampu menanggung biaya berobat atau hanya mampu berobat ke pustu atau puskesmas.
13. Tidak mampu menyekolahkan anak sampai tingkat SMU/ sederajat.

Selain itu, PKBH-B termasuk dalam tim pendataan KPKD yang merancang pendataan keluarga miskin (gakin). Anggota tim lainnya adalah BPM,² Bappeda, BPS, BKKBN, Universitas Bengkulu, Universitas Hazairin, dan PKBI.³ Tim ini berhasil menyusun 13 kriteria gakin yang diukur melalui kuesioner yang memuat 25 pertanyaan (lihat Boks 1 dan 2) dan panduan pelaksanaan pendataan partisipatoris (yang melibatkan masyarakat setempat). Indikator-indikator tersebut disusun berdasarkan hasil KKP yang telah dilaksanakan di Bengkulu. Kriteria dan indikator lokal tersebut dijadikan acuan dalam pendataan gakin yang dibiayai dari APBD Provinsi Bengkulu. Untuk kegiatan pendataan dan analisis di 73 kecamatan dan 1152 desa/kelurahan, APBD mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 juta.

Proses pendataan gakin di seluruh wilayah provinsi dilakukan secara partisipatif, dengan tujuan untuk mencapai tingkat ketepatan yang baik, mengurangi konflik horizontal, dan memberi ruang hak partisipasi masyarakat sebagai sumber keputusan dalam menentukan siapa keluarga miskin. Pendataan diawali dengan pertemuan di kecamatan dengan seluruh kepala desa/lurah, BPD/LMD, dan perwakilan tokoh desa/kelurahan sebagai penanggung jawab pelaksanaan rembung desa/kelurahan untuk menentukan jumlah gakin dan sekaligus mendata masalah kemiskinan pada gakin yang sudah ditetapkan. Pada awalnya banyak aparat desa yang keberatan untuk memberikan kontribusi bagi acara rembung desa/kelurahan dari dana desa, tetapi akhirnya memaklumi kondisi keterbatasan kemampuan Provinsi Bengkulu dalam mendanai seluruh kegiatan karena tidak ada dukungan dari pemerintah pusat. Proses pendataan ini berhasil dilaksanakan selama dua bulan pada tahun 2004. Dalam waktu tersebut data telah ditabulasi seluruhnya oleh BPS, tetapi belum dianalisis.

² BPM: Badan Pemberdayaan Masyarakat.

³ PKBI: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

In addition, PKBH-B has been included in the KPKD data collection team that designed the data collection on poor families (gakin). The other members of the team were BPM,³ Bappeda,⁴ BPS,⁵ BKKBN,⁶ University of Bengkulu, Hazairin University, and PKBI.⁷ This team successfully developed 13 criteria on poor families which were measured through a questionnaire containing 25 questions (see Box 1 and 2) and the implementation guidelines on participatory data collections. These indicators were developed on the basis of the results of the PPA conducted in Bengkulu. These local indicators and criteria became the reference for the data collection on poor families that was funded by the provincial budget of Bengkulu. For data collection and analysis in 73 kecamatan and 1,152 villages, the provincial budget allocated a sum of Rp700 million.

The data collection process on poor families in all districts in the province was undertaken in a participatory way, with the aim of achieving a good level of accuracy, reducing horizontal conflict, and providing the communities the right to determine which families were poor. The data collection commenced with a meeting at the kecamatan with all village heads, BPD/LMD, and village representatives as those responsible for conducting village discussions to determine the number of poor families, and at the same time, collect data on the problem of poverty for the poor families already identified. Initially, many village officials had objections to providing a contribution from village funds for the planned village discussions, but eventually came to understand the limited ability of the Province of Bengkulu to fund all of the activities due to an absence of support from the national government. This data collection process was successfully undertaken during two months in 2004. At that point the data had been entirely tabulated by BPS but had not yet been analyzed.

³ BPM: Badan Pemberdayaan Masyarakat: Community Empowerment Agency. A local government agency for community empowerment.

⁴ Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Regional Development Planning Board.

⁵ BPS: Badan Pusat Statistik: Statistics Indonesia.

⁶ BKKBN: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional: National Family Planning Coordination Board.

⁷ PKBI: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia: Indonesian Planned Parenthood Association.

Iklan Layanan Masyarakat/Public Service Advertisement

NGO MANAGEMENT CERTIFICATE PROGRAM

Angkatan VIII
4 – 17 Februari 2007

Universitas Indonesia, Depok

Benahi organisasi, menuju organisasi masyarakat sipil yang berkesinambungan, efektif dan efisien melalui:

Pelatihan Manajemen Dasar Ornop

Materi pelatihan :
Paradigma NGO, Keberlanjutan Organisasi dan Program,
Manajemen (Perencanaan, SDM, Keuangan), Pengorganisasian Konstituen,
Jaringan Kerja Ornop, serta Isu-isu Manajemen.

Informasi lebih lanjut hubungi :

PACIVIS - UI

Gedung C lantai 2, Kampus FISIP UI Depok 16424

Telp +62 21 78849041, 30076600 Fax +62 21 78892791

Email: ngo_mcp@yahoo.com, dian@pacivis.or.id

C.q. Dian/Ilimi HP 08158903010/08170021284

www.pacivis.or.id



Ironisnya, meskipun pemerintah provinsi telah melakukan pendataan gakin, data tersebut tidak boleh digunakan untuk penentuan sasaran program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat. Dalam penentuan sasaran program SLT, BPS tetap mengikuti sistem pendataan yang ditetapkan dari pusat. Hasil pendataan BPS dianggap Pemda Bengkulu dan masyarakat setempat kurang dapat menangkap realitas kondisi kemiskinan yang sebenarnya karena adanya perbedaan yang tinggi tentang jumlah gakin dibanding dengan data pemda. Penggunaan cara pendataan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini juga memunculkan ketegangan antara daerah dan pusat, dan konflik sosial di masyarakat, serta memunculkan ketidakpercayaan pada upaya pendataan partisipatif yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam rapat konsolidasi pemda dan seluruh dinas terkait dalam program kemiskinan serta KPKD, disepakati bahwa sebelum setiap program kemiskinan dilaksanakan, harus dilakukan konfirmasi ulang dan verifikasi dengan data gakin hasil pengumpulan data partisipatoris KPKD. Baru-baru ini juga telah dibentuk Pokja Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan di Bengkulu untuk membangun mekanisme kontrol pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, baik dari daerah maupun pusat.

Dengan munculnya kesadaran pemerintah dan pelaku pembangunan di daerah untuk melibatkan masyarakat setempat, diharapkan program-program penanggulangan kemiskinan di masa mendatang selain dapat lebih bertanggung gugat dan transparan, juga dirancang berdasarkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat setempat. ■

Ironically, although the provincial government had already conducted data collection on poor families, this data was not allowed to be used for target determination of the Direct Cash Transfer (SLT) Program that was launched by the central government. In the determination of SLT Program targets, BPS followed the data collection system determined by the central office. The provincial government and the local people of Bengkulu felt that the results of the BPS data collection could not capture the actual poverty condition of communities in Bengkulu because of the significant difference between the number of poor families compared with the provincial government's data. The use of the data collection methodology determined by the central government also created tension between the regional and central governments, caused social conflict in the community, and gave rise to distrust in the participatory data collection effort already undertaken. For that reason, in the consolidation meeting of the regional government, the KPKD and all associated agencies in poverty programs, agreement was reached that before each poverty program was implemented, there should be re-confirmation and verification with the data on poor families produced by the participatory data collection of the KPKD. A monitoring group on Poverty Reduction Programs in Bengkulu was recently formed to develop a control mechanism for the implementation of poverty reduction programs, both from the regional and central governments.

With the growing awareness of government and development practitioners in the regions to involve local communities, it is hoped that poverty reduction programs in the future can, apart from being more accountable and transparent, also be planned on the basis of the knowledge and participation of local communities. ■

Boks 2. Jenis Informasi yang Digali dalam Kuesioner Registrasi Gakin di Bengkulu, 2005/ Box 2. Information Revealed in the Questionnaire for the Registration of Poor Families in Bengkulu, 2005

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata belanja harian untuk kebutuhan keluarga. 2. Sumber uang belanja harian. 3. Anggota keluarga yang merupakan sumber penghasilan utama keluarga. 4. Anggota keluarga lainnya yang juga bekerja. 5. Modal utama yang digunakan untuk pekerjaan utama. 6. Beban utang yang ditanggung keluarga. 7. Penggunaan utang. 8. Sumber utang. 9. Status kepemilikan rumah. 10. Perabotan rumah yang dimiliki. 11. Luas rumah. 12. Kondisi ruangan rumah. 13. Kondisi lantai rumah. 14. Bahan dinding rumah. 15. Bahan dan kondisi atap rumah. 16. Kepemilikan WC pribadi. 17. Sumber air minum. 18. Sumber penerangan rumah. 19. Tempat berobat jika anggota keluarga sakit. 20. Kemampuan menyekolahkan anak. 21. Luas kebun/sawah yang dimiliki. 22. Luas kebun/sawah milik sendiri yang dikelola sendiri. 23. Alat tangkap ikan yang dimiliki. 24. Alat usaha yang dimiliki. 25. Tempat usaha bagi pedagang/usaha kecil. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Average daily consumption for family needs. 2. Source of money for daily family consumption needs. 3. Family member who provides the main source of family income. 4. Other family members who are also working. 5. Source of main capital for primary job. 6. Value of family debts. 7. What loans are used for. 8. Source of loan. 9. Ownership of house. 10. Ownership of household appliances. 11. Size of house. 12. Condition of house interior. 13. Condition of floor. 14. Wall material. 15. Material and condition of roof top. 16. Ownership of private toilet. 17. Source of potable water supply. 18. Source of lighting. 19. Where treatment is sought when a family member is ill. 20. Ability to send children to school. 21. Size of farm/rice field owned. 22. Size of farm/rice field owned and self-labored. 23. Ownership of fishing equipments. 24. Ownership of tools used to work. 25. Location of trading activities for small traders. |
|---|---|